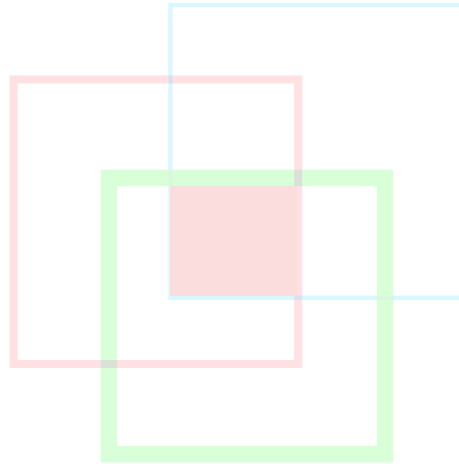


International
Labour
Organization

Program ILO di Indonesia: Capaian 2014



International
Labour
Organization



Program ILO di Indonesia: **Capaian 2014**

Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional 2015
Cetakan Pertama 2015

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: rights@ilo.org Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi www.ifrro.org untuk mengetahui organisasi pemegang lisensi di negara anda.

Program ILO di Indonesia: Capaian 2014/Organisasi Perburuhan Internasional, Kantor Jakarta; ILO, 2015
82 p.

ISBN: 978-92-2-029813-8 (print)
978-92-2-029814-5 (web pdf)

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris: *ILO Works in Indonesia: 2014 Results*; ISBN: 978-92-2-029813-8 (print); 978-92-2-129814-4 (web pdf)/Kantor Perburuhan Internasional - Jakarta: ILO, 2015

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns; www.ilo.org/jakarta, melalui email: ilopubs@ilo.org atau jakarta@ilo.org.

Foto-foto: Koleksi Kantor ILO Jakarta
Editor: Gita F. Lingga
Dicetak di Indonesia

Kata Pengantar



Merupakan kebanggaan kami dapat menghadirkan ‘laporan capaian tahunan’ ketiga yang memaparkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Indonesia. Publikasi ini mencakup capaian-capaian di tahun 2014. Selama dua tahun belakangan ini, prakarsa untuk menerbitkan laporan capaian tahunan mendapat sambutan baik di Indonesia dan di luar negeri sebagai sebuah tinjauan singkat mengenai apa yang telah dicapai.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan tripartit Persatuan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat untuk mempromosikan pekerjaan yang layak untuk semua. Anggota-anggota kami adalah pemerintah dari lebih dari 180 negara serta perwakilan pekerja dan pengusaha mereka. Indonesia adalah anggota aktif ILO, sejak bertahun lamanya.

Hasil yang telah dicapai cukup mengagumkan, termasuk ratifikasi dari kesemua konvensi pokok ILO yang mencakup menentang pekerja anak, menolak diskriminasi, menolak kerja paksa dan kebebasan berserikat. Indonesia pun terus berbagi pengalaman dan keahliannya dengan negara-negara lain seperti terlihat dalam keberhasilannya mengurangi pekerja anak.

Program nasional kami untuk Indonesia (2012-2015) berdasarkan Pakta Lapangan Kerja Indonesia dan terfokus pada:

1. Penciptaan lapangan kerja;
2. Hubungan industrial; dan
3. Perlindungan sosial.

Informasi detil mengenai capaian-capaian tahun 2014 tertuang di halaman-halaman berikut ini.

Capaian-capaian tahun 2014 ini berdasarkan kemitraan dengan para konstituen kami, Pemerintah Indonesia, organisasi pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atas nama pengusaha. Kami terus menjalin kerjasama dengan mereka pada 2015.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kami atas dukungan donor dari berbagai donor, yang tanpa mereka kami tidak akan mungkin melakukan pekerjaan kami. Juga penghargaan kepada tim kolega ILO di Indonesia atas kinerja dan capaian mereka, bekerja sama dengan para mitra serta kolega ILO lainnya.

Kami menyambut baik masukan atas pekerjaan yang kami lakukan serta saran untuk laporan capaian kami berikutnya pada 2015. Untuk informasi mengenai program nasional kami serta berbagai publikasi proyek lainnya, saya mengundang anda untuk melihatnya melalui www.ilo.org/jakarta

Selamat membaca!

Michiko Miyamoto

Penjabat Pelaksana Kantor ILO di Indonesia

Pekerjaan Layak untuk Semua

Pekerjaan merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia. Di samping memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat layak. Pekerjaan layak merupakan rangkuman dari berbagai aspirasi masyarakat dalam kehidupan pekerjaan mereka. Ia melibatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan memperoleh penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga mereka.

Pekerjaan layak berarti prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini membutuhkan adanya kesetaraan peluang dan perlakuan bagi semua

perempuan dan laki-laki. Pekerjaan layak pun merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Karenanya, penciptaan pekerjaan layak harus dimasukkan dalam kebijakan pembangunan.

Daftar Isi

	Kata Pengantar	3
	Daftar Isi	5
	Sekilas Indonesia	9
	A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan	12
	1. Kebijakan ketenagakerjaan	
	♦ Program Kemitraan Korea/ILO: Mengintegrasikan Pekerjaan Layak dalam Perumusan, Pelaksanaan dan Pemantauan Strategi Pembangunan di Indonesia dan Filipina	16
	♦ Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Mengintegrasikan Pekerjaan yang Lebih Baik dan Menciptakan Kesejahteraan Bersama	41
	2. Ketenagakerjaan Muda	13
	3. Pengoptimalan ketenagakerjaan dalam investasi masyarakat	
	♦ Memperkuat Program Infrastruktur Padat Karya untuk Kepentingan Masyarakat	29
	♦ Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur	32
	4. Pengembangan kewirausahaan dan bisnis	
	♦ Program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)	18
	♦ Program Pemulihan Mata Pencarian di Kepulauan Mentawai	22
	♦ Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan Indonesia	35
	♦ Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN	38
	B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif	44
	♦ Better Work Indonesia	45
	C. Perlindungan sosial untuk semua	48
	1. Mendukung Pelaksanaan "Layanan Satu Atap" dalam Strategi Perlindungan Sosial di Provinsi Jawa Timur dan Maluku	50
	2. Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL-Indonesia)	52
	3. Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (UNPRPD)	55
	4. PROMOTE: Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga guna Menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak	57
	4. Program Pekerja Anak	61
	5. Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja	66
	6. Aksi Tripartit untuk Melindungi dan Mempromosikan Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek ASEAN Triangle)	69
	Tema lintas sektor	72
	1. Kesetaraan Gender	
	♦ Akses terhadap Pekerjaan dan Pekerjaan Layak Bagi Perempuan (MAMPU)	73
	♦ Program Pengarusutamaan Gender	77

Bagaimana ILO Bekerja

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 185 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Dalam mengundang pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun peraturan tenaga kerja, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan serta merencanakan program, ILO ingin memastikan bahwa upaya-upayanya ini didasari pada kebutuhan para perempuan dan laki-laki yang bekerja.

ILO bekerja berdasarkan pedoman dari Badan Pemimpin ILO (Governing Body), yang terdiri dari 28 wakil pemerintahan, 14 wakil pekerja/buruh dan 14 wakil pengusaha. Mereka bertugas mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan mempengaruhi kebijakan ILO, mempersiapkan rancangan program dan anggaran, yang kemudian diserahkan kepada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) untuk disetujui, serta memilih Direktur Jenderal.

ILC mengadakan pertemuan setiap bulan Juni tiap tahunnya di Jenewa. Para delegasi didampingi oleh para penasihat teknis. Setiap negara anggota, termasuk Indonesia, memiliki hak untuk mengirimkan empat delegasi ke ILC – dua dari pemerintah dan masing-masing satu mewakili pekerja dan pengusaha. Mereka dapat mengemukakan pendapat dan melakukan pemungutan suara secara mandiri.

ILO di Indonesia: Prioritas dan Keluaran

Indonesia dan ILO telah menjalin kerja sama sejak Indonesia menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. Menerapkan struktur tripartit yang unik, ILO membangun kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan tiga konfederasi serikat pekerja: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Berdasarkan prioritas-prioritas Pemerintah Indonesia, mandat ILO dan fokus para konstituen tripartit, tiga bidang prioritas telah ditetapkan untuk Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 2012-2015:

A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.
4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.

B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarakan hubungan industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing.

C. Jaminan sosial untuk semua

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.

Tema lintas sektor

Kesetaraan gender, tripatisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diurusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP.



Sekilas Indonesia



182.992

Penduduk yang bekerja (in 000)

121.872

Penduduk aktif secara ekonomi (in 000)

114.628

Total ketenagakerjaan (in 000)

7.244

Total pengangguran (in 000)

39.762

Total pekerja mandiri (in 000)

Statistik Utama (2013)

66,4%

Tingkat partisipasi angkatan kerja

62,6%

Rasio tenaga kerja atas penduduk

34,7%

Jumlah pekerja mandiri dalam ketenagakerjaan

8,5%

Tingkat setengah pengangguran

5,9%

Tingkat pengangguran

4,0%

Rasio pengangguran atas penduduk

33,4%

Tingkat ketidakaktifan

Sumber BPS-Statistics Indonesia

PROYEK:



PROGRAM:



Kegiatan



Didukung oleh:



tan ILO di Indonesia



Program ILO di Indonesia: Capaian 2014



International Finance Corporation
World Bank Group



LUX DEV LUXEMBOURG



Norad



Sida



nzaid
New Zealand's International
Aid & Development Agency



Canada

Irish Aid
Department of Foreign Affairs
An Roinn Eireannach Eachtiríoch



A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.
4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.



Proyek Ketenagakerjaan Muda

Sekilas:

Selama 10 tahun terakhir, Kantor ILO untuk Indonesia telah mempromosikan ketenagakerjaan muda melalui berbagai inisiatif yang terfokus pada akses atas pekerjaan yang layak, pelatihan kejuruan dan kewirausahaan, pelatihan keterampilan, dan promosi hak pekerja. ILO telah mempromosikan kondisi yang mendorong kemampuan kerja kaum muda Indonesia melalui Program Pekerjaan Layak Nasional dan melalui proyek-proyek kerjasama teknis seperti “Pelatihan Pendidikan dan Keterampilan untuk Kaum Muda” (EAST) dan “Peluang Kerja untuk Kaum Muda” (JOY) serta proyek transisi dari sekolah ke dunia kerja yang didanai oleh SIDA.

Dedikasi ILO terhadap ketenagakerjaan muda sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendorong ketenagakerjaan muda. Pemerintah Indonesia mempromosikan penciptaan lapangan kerja dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan kaum muda menjadi kelompok prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Indonesia juga berkomitmen dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang bertujuan mewujudkan lapangan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk kaum muda. Saat ini Indonesia melanjutkan komitmennya dalam pengembangan Agenda Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015. Pemerintah telah menerapkan strategi pembangunan empat pilar yaitu pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro-masyarakat miskin dan pro-lingkungan, sejalan dengan komitmennya.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Peluncuran kembali Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia (IYEN) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan bantuan dari ILO dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).** Serangkaian konsultasi dan lokakarya diadakan bersama oleh berbagai kementerian, LSM, perguruan tinggi dan sektor swasta untuk memperbarui inventarisasi kegiatan mempromosikan ketenagakerjaan muda yang ada, serta menyusun rencana penggunaan portal *online* IYEN sebagai sarana berbagi pengetahuan, mengkoordinir kegiatan dan memperkuat kemitraan. IYEN juga akan menjadi media bagi kaum muda untuk memperoleh saran saat memasuki dunia kerja, penempatan kerja dan lainnya.
2. **Lokakarya tentang “Kebijakan dan Program Ketenagakerjaan Muda di Indonesia: Langkah Ke Depan” yang diadakan bersama TNP2K dan Bappenas.** Lokakarya ini mengundang para ahli, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk membahas transisi dari sekolah ke dunia kerja di Indonesia, serta sistem pengembangan keterampilan khusus termasuk sistem magang. Lokakarya ini juga merupakan puncak dari serangkaian konsultasi mengenai IYEN, di mana strategi khusus untuk reformasi kebijakan diidentifikasi.
3. **Penyelesaian publikasi ILO “Pekerjaan dan Keterampilan bagi Kaum Muda: Kajian Kebijakan mengenai Ketenagakerjaan Muda Indonesia”.** Laporan yang diproduksi bersama dengan Understanding Children’s Work (UCW) ini bertujuan untuk membantu upaya Indonesia dalam menangani masalah transisi ke pasar kerja yang dialami kaum muda di Indonesia, lengkap dengan analisa tentang situasi saat ini dan rekomendasi untuk meningkatkan prospek kaum muda.



Target Tahun 2015:

- Mendukung IYEN dan mengembangkan kapasitasnya sebagai sarana bagi kaum muda dalam memperoleh informasi dan sumber daya lainnya, serta bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengakses informasi terbaru tentang ketenagakerjaan muda di Indonesia, termasuk program-program yang sedang dilaksanakan saat ini.
- Mengadakan konsultasi tripartit mengenai kegiatan magang di Indonesia dengan tujuan menyusun rencana aksi guna membimbing perbaikan sistem magang yang ada saat ini serta membantu kaum muda meningkatkan keterampilan mereka melalui lembaga formal.
- Mengidentifikasi bidang-bidang di sektor pariwisata yang memberikan peluang bagi kaum muda untuk mengembangkan perusahaan yang ramah lingkungan dan menemukan pekerjaan produktif melalui misi penilaian guna memilih daerah wisata di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan

Mempromosikan pekerjaan bagi kaum muda di Indonesia

Kurangnya kesiapan lulusan muda Indonesia dengan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar dan ketidakcocokan keterampilan merupakan salah satu tema kunci yang dibahas dalam lokakarya satu hari bertema “Kebijakan dan Program Ketenagakerjaan Muda di Indonesia: Langkah ke Depan”, yang diselenggarakan ILO pada 25 September di Jakarta. Tema-tema ini sejalan dengan tingginya tingkat pengangguran muda di negeri ini dan di seluruh dunia. Karenanya, menjadi penting bagi kaum muda memperoleh kesempatan kerja dan menghidupi diri mereka.

Lokakarya ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Wakil Presiden dan didukung Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Tujuan utama lokakarya ini adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan, sebagai hal penting yang dibahas



disepanjang lokakarya ini untuk menyelesaikan semua persoalan terkait kaum muda di negeri ini. Lokakarya ini juga bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pandangan, serta meningkatkan kesadaran tentang

....semua peserta lokakarya mengakui agar mampu mengatasi masalah ketidakcocokan keterampilan...diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan.

tantangan yang dihadapi kaum muda.

Selama diskusi, semua peserta lokakarya mengakui bahwa Balai-balai pelatihan dan sekolah-sekolah kejuruan belum mampu mengatasi masalah ketidakcocokan keterampilan dan diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan. Sebagian peserta bahkan menyatakan bahwa hal ini terjadi di sektor pertanian—di mana orang muda kurang

tertarik melakukan pekerjaan pertanian dan bahkan tidak memiliki keterampilan dan pendidikan pertanian.

Tema utama lain yang dibahas adalah sistem pemagangan di Indonesia. Diakui bahwa pemagangan dapat sulit dikelola, dengan pekerja dan siswa sama-sama mengambil kesempatan dan, dalam sejumlah kasus, mereka berisiko dieksploitasi. Kendati demikian, disepakati bahwa sistem yang dirancang dengan baik yang melibatkan kepercayaan, kontrak yang baik, serta partisipasi semua pemangku kepentingan dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk melatih kaum muda. ❖

**Program Kemitraan
Korea/ILO:
Mengintegrasikan
Pekerjaan Layak
dalam Perumusan,
Pelaksanaan dan
Pemantauan Strategi
Pembangunan
di Indonesia dan
Filipina**



Sekilas:

Di Indonesia, proyek ini difokuskan pada upaya untuk mendukung berbagai analisa, dialog tripartit dan peningkatan kapasitas terkait ketenagakerjaan dan pasar kerja sebagai bahan masukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Program peningkatan kapasitas ini mencakup kunjungan penelitian ke Korea Employment Information Service (KEIS) oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk belajar lebih jauh mengenai sistem proyeksi ketenakerjaan di Republik Korea. Beberapa penelitian telah dilaksanakan dan laporan singkat tentang kebijakan telah disusun di bidang-bidang berikut.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Pertimbangan metodologis dalam merencanakan pertumbuhan yang kaya lapangan kerja** – Proyeksi ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari sistem pemantauan hasil pasar kerja, karena proyeksi ini menyediakan informasi kepada para pembuat kebijakan tentang gambaran ketenagakerjaan dan dapat membantu mengidentifikasi berbagai jenis intervensi pasar kerja yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Untuk membantu mengarusutamakan isu ketenagakerjaan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, ILO telah menyiapkan proyeksi ketenagakerjaan untuk periode 2014-2019 dengan menggunakan berbagai metodologi dan memfasilitasi sejumlah diskusi teknis mengenai peran proyeksi ketenagakerjaan dalam mendukung pertumbuhan yang mampu menghasilkan lapangan kerja.



2. **Memperkuat sistem informasi dan layanan pasar kerja** – Ada dua jenis informasi pasar kerja yang utama di Indonesia, yaitu data mikro yang dikumpulkan Biro Pusat Statistik (BPS) dan data mikro yang dikumpulkan bagian layanan pekerjaan Kementerian Ketenagakerjaan. ILO telah mengkaji sistem dan layanan ini agar dapat memberi rekomendasi untuk memperkuat informasi tentang pasar kerja di Indonesia.
3. **Informasi terbaru tentang tren sosial dan ketenagakerjaan,**

Agustus 2014 –Guna memastikan konstituen ILO memperoleh akses atas informasi terbaru tentang tren ketenagakerjaan di Indonesia, informasi terbaru mengenai indikator-indikator pasar kerja telah disusun. Persoalan penting terkait pasar kerja, seperti pekerjaan di sektor perekonomian informal, telah dipaparkan bersama dengan rekomendasi kebijakan untuk mempromosikan pertumbuhan yang kaya lapangan kerja.

Target Tahun 2015:

- Perangkat dan pendekatan perencanaan ketenagakerjaan dipergunakan para konstituen untuk merencanakan dan memantau pertumbuhan yang kaya lapangan kerja.
- Memperkuat sistem informasi pasar kerja dan layanan ketenagakerjaan untuk mendukung hasil ketenagakerjaan (*employment outcomes*).



A group of people, likely staff or volunteers, are working in a kitchen or food preparation area. They are wearing blue uniforms, blue hairnets, and light blue surgical masks. They are also wearing clear plastic gloves. They are holding and preparing trays of small, round, yellow items, which appear to be dumplings or buns. The background is a plain, light-colored wall.

Diluncurkan pada Juli 2010, program SCORE Indonesia dirancang untuk membantu usaha kecil-menengah (UKM) di Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas, memperbaiki kondisi kerja, mengurangi jejak (karbon) lingkungan dan mempererat kerjasama serta komunikasi antara pengusaha dan pekerja. Program ini membantu perusahaan agar lebih berdaya saing di pasar global sehingga menciptakan lapangan kerja.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. Pelaksanaan Modul SCORE Indonesia tentang Kerjasama di Tempat Kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan anggaran sendiri di tiga provinsi baru: Sumatera Utara, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan ini sebesar USD 45.868.

2. Pelaksanaan modul-modul SCORE di empat provinsi yang ada: Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung dan DKI Jakarta dengan modul baru (yaitu Modul 5 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3) dan Modul 1.

3. Sebagai hasil kemitraan dengan SCORE, terdapat 10 penyedia layanan teknis yang terpilih untuk mengadakan dan mengelola pelatihan untuk perusahaan SCORE berbayar di seluruh Indonesia. Salah

satunya adalah BEDO dari Bali yang telah berhasil mengadakan pelatihan tahap pertama, di mana perusahaan peserta membayar biaya komitmen sebesar USD 150. Dalam acara ini, BEDO juga mengundang staf Swiss Contact untuk memantau jalannya keseluruhan lokakarya. Swiss Contact mengapresiasi metodologi SCORE dan berminat menggunakannya di sektor pariwisata.

4. Penyelenggaraan pelatihan Modul 5 tentang K3 di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, bekerja sama dengan Direktorat Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.

5. Dukungan terhadap Kementerian Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan seminar nasional tentang Productivity Gain Sharing sebagai bagian dari hasil kegiatan tim AC4 dan SCORE Indonesia.

6. Perbandingan data gender antara tahap I (2009-2012) dengan Tahap II (2013-sekarang):

- ♦ Jumlah perempuan yang aktif menjadi pelatih meningkat dari 8 menjadi 16 orang.
- ♦ Jumlah perempuan yang memiliki perusahaan, meningkat dari 14 persen menjadi 23 persen.
- ♦ Jumlah staf perempuan yang dilatih dalam lokakarya ini meningkat dari 33 persen menjadi 41 persen.

7. Sistem pangkalan data Evaluasi dan Monitoring SCORE (dibuat pada 2012), memaparkan seluruh hasil yang dicapai: **127 perusahaan yang terdaftar sebagai peserta pelatihan SCORE Indonesia, 60 instruktur aktif; 303 manajer (38 persen) dan 492 pekerja (62 persen) telah mengikuti pelatihan. Sekitar 38 persen dari jumlah total manajer dan pekerja adalah perempuan (mulai Februari 2015).**



Target Tahun 2015:

- Membantu Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program SCORE melalui anggaran yang ditanggung bersama dengan anggaran daerah.
- Mengembangkan sertifikasi Kompetensi Standar Nasional yang baru untuk pelatih SCORE dengan menyesuaikan standar yang ada dengan metodologi SCORE.
- Mengembangkan modul-modul SCORE versi pendek dengan melakukan sejumlah penyesuaian dari SCORE Global. Modul-modul versi pendek ini akan digunakan untuk provinsi yang memiliki jumlah instruktur produktivitas yang terbatas dan akan diterapkan untuk UKM yang tidak termasuk dalam persyaratan SCORE.
- Membantu Kementerian Ketenagakerjaan, melalui Balai Latihan Kerja Produktivitas di Bekasi, untuk memodifikasi kurikulum pelatihan dasar bagi para pelatih produktivitas nasional agar sesuai dengan metodologi SCORE. Kegiatan ini mencakup pelatihan di ruang kelas, kunjungan ke lapangan dan layanan konsultasi.

 scoreindonesia@gmail.com
 SCORE.Indonesia
 www.scoreindonesia.net
 ILO SCORE
 @SCORE_Indonesia

Estiarty Haryani, Direktur Produktivitas dan Kewirausahaan, Kementerian Ketenagakerjaan:

Program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE), diluncurkan di Indonesia pada 2010, dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil menengah (UKM). Program yang awalnya diinisiasi oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) ini, kini telah menjadi sebuah program tripartit (dilakukan bersama antara pemerintah, serikat pekerja dan organisasi pengusaha).

Pada 2012, program SCORE diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan memasukkan metodologi dan modul SCORE sebagai salah satu metode peningkatan produktivitas di Indonesia. Selanjutnya modul SCORE dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan/pelatihan dasar instruktur produktivitas nasional dan telah memberikan pembekalan dalam bentuk Pelatihan untuk Pelatih (ToT) bagi 46 instruktur produktivitas dan pengawas ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan lalu memperluas dan melaksanakan pelatihan SCORE ini ke sejumlah provinsi baru seperti Sumatera Utara, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Kini program SCORE telah dilaksanakan di sepuluh provinsi yang menjangkau 127 UKM dengan lima di antaranya telah dianugerahi penghargaan Parama Karya, sebuah penghargaan tertinggi pencapaian produktivitas yang diberikan Presiden Republik Indonesia.

Tidak hanya itu, Kementerian Ketenagakerjaan bersama ILO saat ini sedang menggodok rencana pendirian Centre of Excellence SCORE pada tahun ini yang akan menjadi sebuah pusat informasi bagi UKM dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing mereka. Diharapkan Centre of Excellence ini dapat menjangkau lebih banyak lagi UKM dan berfungsi sebagai sarana bagi UKM

yang saat ini mencapai lebih dari 60 persen dalam memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan dan peningkatan produktivitas berdasarkan modul-modul pelatihan SCORE.

Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen Kementerian Ketenagakerjaan dan jajarannya dalam memastikan keberlanjutan program SCORE di Indonesia. Estiarty Haryani, Direktur Produktivitas dan Kewirausahaan, Kementerian Ketenagakerjaan, misalnya. Untuk mendalami program SCORE ini, ia telah mengikuti program pelatihan SCORE dan turut serta dalam proses pelatihan dan penyebarluasan SCORE ke daerah-daerah serta memastikan pelaksanaan dan keberhasilannya.

"Berbeda dengan metodologi peningkatan produktivitas yang ada, program SCORE memberikan pelatihan yang bersifat bertahap dengan cara pendekatan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan UKM," ujar Estiarty. "Ini yang membuat metodologi SCORE sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM," ia menambahkan.

Pelatihan SCORE mengombinasikan pelatihan di ruang kelas dengan pelatihan di tempat kerja. Pelatihan diawali lokakarya komprehensif selama dua hari memperkenalkan konsep-konsep dasar dan sarana perbaikan yang dapat dilakukan, dilanjutkan dengan tiga kunjungan lokasi ke masing-masing perusahaan. Tema pelatihan terfokus

”

Mengingat luasnya Indonesia, dengan versi singkat ini diharapkan pemerintah-pemerintah daerah dapat melakukan sendiri dengan anggaran daerah. Saat ini, program SCORE telah menjadi bagian dari Balai Peningkatan Produktivitas Daerah di 22 provinsi, dan diharapkan terus berkembang luas

“

Program SCORE Efektif Tingkatkan Produktivitas UKM Indonesia

pada lima modul program SCORE yang meliputi kerjasama di tempat kerja, manajemen kualitas, produktivitas dan produksi yang lebih bersih, manajemen sumber daya manusia dan kesehatan serta keselamatan kerja.

Karenanya, Estiarty menegaskan dalam penerapan SCORE tidak dimungkinkan adanya rekayasa hasil. Dengan sistem pendampingan, semua perbaikan dan keberhasilan yang dicapai terukur dan terpantau. “Awalnya banyak UKM yang ragu. Apa iya bisa berhasil? Apa tidak hanya membuang waktu? Umumnya UKM tidak menyadari sistem kerja mereka belum produktif dan hanya menjalankan apa yang mereka tahu.

Namun setelah menjalani dan merasakan sendiri hasilnya, mereka malah meminta mengikuti pelatihan modul-modul lainnya,” terang Hesti.

Minimal tiga bulan setelah penerapan program SCORE, perusahaan-perusahaan mengakui adanya peningkatan produktivitas, kondisi kerja yang lebih baik, dan membaiknya komunikasi antara manajemen dan pekerja. Perusahaan-

perusahaan pun memperlihatkan pencapaian target kerja, alur produksi yang lebih baik, penurunan jumlah pengerjaan ulang, pengembalian produk, penurunan tingkat absensi dan penurunan jumlah kecelakaan kerja.



Sementara menanggapi permintaan pelatihan lanjutan, Kementerian Ketenagakerjaan dengan dukungan ILO tengah menyusun versi singkat dari kelima modul SCORE ini. Diharapkan dengan adanya versi singkat ini akan mempermudah penerapan pelatihan SCORE di daerah-daerah dengan keterbatasan instruktur dan sumber daya.

“Mengingat luasnya Indonesia, dengan versi singkat ini diharapkan pemerintah-pemerintah daerah dapat melakukan sendiri dengan anggaran daerah. Saat ini, program SCORE telah menjadi bagian dari Balai Peningkatan Produktivitas

Daerah di 22 provinsi, dan diharapkan terus berkembang luas,” ujar Estiarty menjelaskan.

Ia berharap program SCORE ini dapat terus berlanjut, semakin luas penerapannya dan bahkan dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. “Harapan saya produktivitas dan menjadi produktif bisa menjadi bagian dari kehidupan semua orang serta menjadi bagian jiwa setiap pekerja dan usaha. Dan program SCORE ini dapat membantu adanya perubahan pola pikir dan kerja yang lebih

produktif,” lanjutnya.

Program SCORE awalnya didanai Sekretaris Negara untuk Bidang Ekonomi Swiss (SECO) dan Badan untuk Kerja Sama Pembangunan Nowergia (NORAD). Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara yang melaksanakan program SCORE secara global, yaitu India, Tiongkok, Afrika Selatan, Ghana, Vietnam dan Kolombia. ❖

Program Pemulihan Mata Pencarian di Kepulauan Mentawai



Sekilas:

Program Pemulihan Mata Pencarian di Kepulauan Mentawai bertujuan membantu pemulihan ekonomi produktif bagi 477 keluarga di Pagai Utara dan Selatan yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami tahun 2010. Program ini membantu memulihkan sektor pertanian dan perikanan, memfasilitasi pembangunan rantai nilai pertanian dan perikanan serta membantu perencanaan strategis terkait penyediaan layanan dasar, termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi.

Program ILO-Mentawai adalah bagian dari upaya bersama PBB dengan Food and Agricultural Organization (FAO) dan United Nation Development Programme (UNDP), yang didanai pemerintah Selandia Baru melalui Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR). Program bersama PBB ini bertujuan mencapai dua hasil utama, yaitu: 1) Memulihkan, memperbaiki dan mendiversifikasi mata pencarian di sektor pertanian melalui pendekatan rantai nilai, dan 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk mempromosikan upaya pemulihan mata pencarian dan mendorong penyediaan layanan sosial dan publik yang mendasar. Proyek yang dimulai pada 2012 ini berakhir pada September 2014.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Sebanyak 30 orang muda Mentawai (9 perempuan dan 21 laki-laki) yang terkena dampak tsunami dinyatakan lulus proses sertifikasi untuk pelatihan kerja berbasis kompetensi** di tiga bidang: pelatihan servis motor, pembuatan perabotan dan makanan ringan. Mereka telah kembali ke kepulauan Mentawai untuk membangun kembali masyarakat.

2. **Pelaksanaan pendampingan setelah pelatihan bagi 30 orang muda Mentawai yang telah mengikuti pelatihan keterampilan** untuk membuka usaha sendiri. Pendampingan ini terdiri dari alat kerja standar untuk

membuka usaha sendiri (peralatan untuk membuat perabotan, bengkel motor dan makanan ringan serta kemasannya) dan bantuan langsung di lapangan untuk mengembangkan usaha oleh satu tim konsultan bisnis.

3. **Penyelesaian pelatihan terpadu mengenai produksi makanan ringan dan kewirausahaan oleh 200 perempuan Mentawai** dengan menggunakan modul GET Ahead ILO. Pelatihan pembuatan makanan ringan ini difasilitasi peserta pelatihan sebelumnya. Sedangkan, pelatihan kewirausahaan selama lima hari difasilitasi 15 pelatih lokal yang sudah menyelesaikan pelatihan untuk pelatih selama delapan hari tentang modul GET Ahead ILO.

4. **Penetrasi pasar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan yang memproduksi makanan ringan dari KM 37 Pagai Selatan ke Padang.** Mereka mampu menjual produk pertama dari Mentawai secara rutin.

5. **Pelaksanaan kajian mendalam mengenai lembaga keuangan mikro di Mentawai,** yang bertujuan mengidentifikasi strategi dan program yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjangkau masyarakat Mentawai yang

sebagian besar hidup di daerah terpencil.

6. **Penyelesaian pelatihan untuk nasabah mengenai pendidikan keuangan keluarga oleh 100 penerima manfaat dari Mentawai,** yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan uang secara lebih baik. Serangkaian pelatihan ini diadakan 20 pelatih yang telah menyelesaikan Pelatihan untuk Pelatih tentang Pendidikan Keuangan.

7. **Pelaksanaan pelatihan mengenai hak-hak di tempat kerja bagi para penerima manfaat lokal, termasuk staf pemerintah daerah dari Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi dan kabupaten dan pengurus serikat pekerja,** dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang standar perburuhan dan ketenagakerjaan.

8. **Pelaksanaan pemantauan bersama di lapangan** yang melibatkan partisipasi perwakilan PBB, New Zealand Aid, staf pemerintah terkait dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Staf pemerintah terkait meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



Harapan Baru bagi Kepulauan Mentawai

Hari masih pagi di Dusun Maurou, Desa Bulasat, Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai. Namun deru alat pemotong kayu sudah terdengar dari bengkel pembuatan mebel yang bernama Sinula Perabot. Ringgas Samaloisa, sang pemilik, tampak sibuk membuat lemari kayu; sementara tiga pekerjanya sibuk memenuhi pesanan pintu dan kusen jendela.

"Saya tidak pernah membayangkan kehidupan saya seperti ini. Bencana tsunami tahun 2010 telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Bengkel pembuatan perabotan saya ini terus menerima pesanan sebanyak 500 pintu dan kusen jendela dari masyarakat setempat yang sedang memperbaiki



dan membangun kembali rumah baru mereka," jelas Ringgas. Dari usahanya ini, ia mampu memperoleh pemasukan sebesar Rp. 10 juta hingga Rp. 30 juta per bulan.

Sementara itu, Januar memilih untuk membuka bengkel servis motor. Kondisi jalan yang ekstrim membuat motor yang digunakan sebagai alat transportasi utama membutuhkan perawatan dan perbaikan secara rutin. Meski ia hanya menerima tiga hingga empat motor per bulan, ia yakin usahanya akan terus berkembang.

"Saya melihat peluang usaha yang menjanjikan untuk bengkel servis motor. Warga setempat perlu merawat dan memperbaiki motor mereka, terutama dengan kondisi jalan seperti ini, berlumpur dan sulit dilalui. Kadang-kadang kami harus menggotong motor kami," kata Januar.



Seperti Januar, Firky Agusta Pratama memfokuskan usahanya di bidang servis motor. Namun, ia memilih untuk menyediakan layanan servis berjalan (mobile) sebagai keunggulan kompetitifnya. Ia langsung mendatangi rumah-rumah pelanggan dan dapat memperbaiki satu atau dua buah motor seminggu.

"Kurangnya suku cadang dan jauhnya jarak perjalanan ke setiap rumah (pelanggan), saya tidak dapat memperbaiki lebih dari dua motor per minggu. Sejauh ini, saya memperoleh penghasilan yang cukup, Rp 2 juta per bulan."

Relawati Taileleu lebih menyukai bisnis keripik talas. Setiap minggu, ia mengepak keripik ke dalam plastik-plastik kecil dan menjualnya seharga Rp. 7.000 sampai Rp. 8.000 per bungkus. Ia tidak lagi

”
Pelatihan ini merupakan bagi dari metodologi pelatihan "4 in 1" ILO yang memadukan survei keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan dukungan setelah pelatihan
“



tergantung pada pemasukannya dari hasil kebun. “Mentawai terkenal akan sumber daya alamnya. Di sini mudah mendapatkan pisang dan talas dan tidak dibutuhkan biaya besar untuk membuat keripik. Penghasilan yang saya dapatkan sangat membantu keluarga saya.”

Ringgas, Januar, Firky dan Relawati adalah para penerima manfaat yang berasal dari Pagai Selatan dan Pagai Utara, Mentawai. Mereka terpilih Program Pemulihan Mata Pencapaian Kepulauan Mentawai ILO untuk mengikuti program pelatihan keterampilan di bidang makanan ringan, servis motor dan pembuatan perabot selama dua minggu di Balai Latihan Kerja (BLKI) Sumatera Barat dan Balai latihan Universitas Padang.

Mereka tidak pernah bermimpi menjadi pengusaha. Laiknya sebagian



besar penduduk Mentawai, sebelum tsunami menghantam kepulauan ini pada Oktober 2010, mereka bekerja di perkebunan—menanam coklat, kelapa dan minyak nilam—atau sebagai pekerja di industri perikanan. Bencana tsunami menimbulkan kerugian sebesar Rp. 117,82 milyar, dan hampir 80 persen dari total kerugian ini diderita sub-sektor perkebunan dan perikanan.

“Kami memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal agar mereka dapat menerapkan apa yang mereka pelajari untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pelatihan ini difokuskan tidak saja pada keterampilan hidup dan cara memperoleh penghasilan, tapi juga perubahan pola pikir dan perilaku. Mereka belajar tentang perencanaan usaha, pengelolaan

pemasaran dan pengembangan jaringan usaha,” kata Drs. Dinul Harbi dari Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Mentawai.

Untuk memastikan peserta pelatihan memiliki kapasitas untuk membuka usaha sendiri, semua penerima manfaat memperoleh bantuan pasca-pelatihan dari ILO. Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan kerja, di samping pengemasan, merek, dan bantuan pemasaran, serta pembinaan usaha.

“Pelatihan ini merupakan bagi dari metodologi pelatihan “4 in 1” ILO yang memadukan survei keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan dukungan setelah pelatihan,” kata Irham Saifuddin, Staf ILO. “Namun, selain dukungan dan pelatihan kerja, hal yang paling penting adalah motivasi dan dedikasi dari para peserta. Motivasi dan semangat mereka sangat luar biasa. Mereka pantang menyerah apapun yang terjadi.”

Kepulauan Mentawai merupakan rantai kepulauan yang terdiri dari lebih 70 pulau dan pulau-pulau kecil di pantai barat Pulau Sumatera, Indonesia. Didanai Program Pemulihan Mata Pencapaian Kepulauan Mentawai merupakan program bersama antara United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP) dan ILO. ❖

Program Keuangan Sosial/Inklusi Keuangan



Sekilas:

Program Keuangan Sosial ILO mendukung upaya untuk memperluas layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak pernah dilibatkan. Ada dua tujuan utama program ini, yaitu: 1) Mempromosikan pekerjaan yang lebih baik; dan 2) Mengurangi kerentanan pekerja miskin. Jumlah usaha kecil dan mikro (UMKM) mencapai 99,9 persen dari jumlah keseluruhan perusahaan yang ada di Indonesia serta menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 91,7 persen dari jumlah total pekerjaan. Kendati kontribusi UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, namun UMKM masih menghadapi masalah dan hambatan struktural, fiskal maupun non fiskal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Program Keuangan Sosial ILO Jakarta berupaya untuk meningkatkan mutu layanan Penyedia Layanan Keuangan non-formal, semi-formal dan formal untuk pekerja miskin.

Akibat penundaan dari Sekretariat Negara Swiss Bidang Ekonomi (SECO) sebagai donor utama Program Mempromosikan Usaha Kecil dan Mikro melalui Peningkatan Akses Pengusaha terhadap Layanan Keuangan (PROMISE IMPACT) pada 2014, program Keuangan Sosial Jakarta lebih berfungsi sebagai program lintas sektor untuk berbagai proyek ILO yang sedang berjalan. Hal inilah yang mempertahankan momentum bagi PROMISE IMPACT Tahap II yang akan dimulai pada kuartal pertama 2015.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Pengadopsian modul Anggaran Pintar ILO, terutama modul mengenai Pengelolaan Risiko dan Asuransi serta Mengelola Uang Anda secara Pintar, oleh Bank Indonesia.** ILO Jakarta bekerja sama dengan mitra pemerintah, seperti Bank Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengembangkan modul-modul lokal. Bank Dunia juga dilibatkan dalam upaya bersama ini dengan berperan pada modul mengenai "Tabungan" dan "Mengelola Pinjaman."

2. **Penyelesaian Penelitian tentang Lanskap Keuangan, serta Pelatihan mengenai "Making Microfinance Work", bagi Program Pemulihan Mata Pencarian Mentawai ILO (Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat).** Penelitian ini

ditujukan bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif untuk mempersempit kesenjangan antara kebutuhan dan permintaan masyarakat atas akses keuangan dengan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan/permintaan tersebut. Penelitian serupa dilakukan Program Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan ILO (Kupang, Nusa Tenggara Timur) pada akhir tahun.

3. **Pengembangan aliansi jejaring baru antara lembaga keuangan dan lembaga non keuangan.**

Di Mentawai, misalnya, salah satu lembaga keuangan di Sipora telah melakukan perubahan besar terhadap model usaha mereka guna memperluas cakupan pasar serta keberlanjutannya. Sementara di Jawa Timur, kemitraan strategis antara lembaga keuangan, kalangan akademisi, dan otoritas tenaga kerja menjadi sinergi yang patut dicontoh dalam melaksanakan Penelitian Berbasis Aksi.

4. **Penyelesaian penelitian berbasis aksi mengenai masalah Keuangan Mikro-Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Jawa Timur,** dilaksanakan bersama oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Bank BPR UMKM Jatim. Penelitian awal ini mencakup nasabah 585 Bank BPR UMKM Jatim di delapan kabupaten, yang bertujuan untuk mempromosikan praktik K3 yang lebih baik serta mengkaji secara efektif dampak peningkatan K3 terhadap produktivitas dan kesejahteraan nasabah.

5. **Pelaksanaan pelatihan untuk pelatih tentang K3 bagi 30 Staf Akun Bank,** bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja di tingkat pusat dan provinsi. Kombinasi pelatihan tentang keuangan mikro dan K3 ini merupakan pelatihan pertama di Indonesia. Pegawai bank yang berpartisipasi ini diharapkan memberikan pelatihan kepada para nasabah mengenai K3 pada 2015.

Target Tahun 2015:

- Menjalankan Pendidikan Keuangan bagi Pekerja Migran dan Keluarga Mereka secara nasional dengan menggunakan anggaran pemerintah.
- Membentuk proses sertifikasi bersama bagi pelatih pendidikan keuangan mengenai materi ILO/Bank Indonesia.
- Menyelesaikan Penelitian tentang Lanskap Keuangan bagi Proyek Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan beserta inisiatif-inisiatif layanan sosial masyarakat.
- Menyelesaikan Pelatihan untuk Nasabah oleh Pegawai Bank BPR UMKM Jatim yang telah mengikuti pelatihan di delapan kabupaten di Jawa Timur, diikuti dengan survei pemantauan pertama.
- Mengadaptasi Modul Pengembangan Usaha Berbasis Masyarakat (C-BED), Literasi Keuangan, Keuangan Mikro dan Pengelolaan Modal Kerja yang akan digunakan bersama modul-modul pelatihan kewirausahaan ILO.
- Mereplikasi modul-modul Literasi Keuangan dan Keuangan Mikro.
- Menyelesaikan tahap awal PROMISE IMPACT sebagai berikut: 1) Melaksanakan survei awal tentang distribusi ukuran perusahaan dalam portofolio penyedia layanan keuangan yang berpartisipasi; 2) Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi nasabah dan calon nasabah layanan keuangan; dan 3) Menyediakan bantuan teknis bagi mitra layanan keuangan dalam merancang dan menguji-coba layanan keuangan yang inovatif.
- Melaksanakan inisiatif asuransi mikro (didukung Inisiatif Dampak Asuransi ILO Jenewa) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia

ILO Berkontribusi pada Manual Pendidikan Keuangan bagi Pekerja Migran



Diperkirakan sekitar 6,5 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) saat ini bekerja di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara Timur Tengah. Indonesia merupakan negara pengirim pekerja

migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Hal ini menempatkan migrasi kerja sebagai sektor ekonomi yang strategis karena penerimaan dana dari luar negeri, yang tidak diragukan lagi menjadi devisa terbesar kedua di negeri ini setelah minyak dan pertambangan.

Berbagai upaya perlu dilakukan agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan remitansi TKI, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas TKI tentang pemanfaatan remitansi yang efektif. Menyikapi hal ini, Bank Indonesia (BI) mengundang ILO untuk menjadi bagian dari tim pengembangan manual tentang pendidikan keuangan bagi pekerja migran Indonesia.

Di samping ILO, BI juga melibatkan partisipasi lembaga pemerintah dan LSM terkait untuk menyusun buku manual bersama yang diberi judul "Pendidikan

Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia". Organisasi-organisasi lain yang ikut dilibatkan antara lain adalah Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Bank Dunia, Yayasan Tifa dan sejumlah bank nasional.

"Manual ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi TKI dan keluarga mereka dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan remitansi. Dalam manual ini, ILO memberikan kontribusi pada bab-bab tentang "Pengelolaan Keuangan" dan "Asuransi Pekerja Migran" yang menyediakan panduan tentang cara menyusun catatan keuangan dan pengenalan asuransi serta asuransi pekerja migran, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempersiapkan klaim asuransi," jelas Irham Saifuddin, Staf ILO.

Saat ini manual tersebut sudah difinalisasi dan validasi. Hingga akhir tahun 2014, manual ini akan digunakan dalam pelatihan untuk pelatih yang diadakan di Balai Latihan Kerja TKI (BLKLN) di Jakarta dan sekitarnya dan di Malang, Jawa Timur. Sedangkan untuk penerapannya di masa mendatang, Pemerintah Indonesia melalui BI, Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI berencana menggunakan manual ini sebagai paket pelatihan wajib yang dimasukkan dalam pelatihan pra

keberangkatan bagi semua calon TKI. Dengan demikian, calon TKI diharapkan memiliki keterampilan yang dibutuhkan, terutama dalam mengelola dan merencanakan penghasilan mereka saat bekerja di luar negeri.

Eni V. Panggabean, Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Medium (DPAU) BI, mengatakan, "Pengetahuan dan kesadaran masyarakat, termasuk komunitas pekerja migran, tentang masalah pengelolaan keuangan masih rendah. Akibatnya, ini akan membatasi kapasitas mereka dalam mengelola penghasilan, investasi yang produktif dan mitigasi risiko masalah-masalah keuangan dan kebiasaan menabung," katanya.

Terkait masalah pentingnya pendidikan keuangan bagi TKI, Irham menyimpulkan bahwa "pendidikan keuangan memiliki dua dimensi penting bagi TKI: meningkatkan perlindungan TKI karena memperkenalkan mitigasi risiko berbasis hak serta memperkuat kapasitas dasar TKI dan keluarga mereka dalam merencanakan dan mengelola migrasi, penghasilan serta investasi mereka di masa mendatang yang dapat membantu mereka mempersiapkan diri dalam menyongsong masa depan yang lebih baik." ❖



Memperkuat Program Infrastruktur Padat Karya untuk Kepentingan Masyarakat

Sekilas:

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki mandat untuk mempromosikan perluasan pekerjaan dan pengembangan sektor perekonomian informal melalui program-program pasar kerja aktif yang mampu mempromosikan pengembangan mata pencarian. Untuk melaksanakan mandat ini, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan sejumlah program nasional, termasuk program Padat Karya nasional.

Program-program ini bertujuan menciptakan dan memperluas akses atas peluang kerja melalui investasi aset dan keterampilan yang mendukung pembangunan ekonomi di desa. Tujuan langsung dari program-program ini adalah memberdayakan pekerja dan masyarakat setempat melalui penciptaan lingkungan yang mendukung, sementara tujuan yang lebih tinggi adalah mempromosikan perluasan kerja dan pengembangan usaha. Dengan pelaksanaan program ini di lebih dari 300 kabupaten/kotamadya, program-program ini menjadi bagian penting dari strategi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan pendekatan berbasis sumber daya lokal (LRB) ILO sebagai bagian dari Program Infrastruktur Padat Karya guna membantu peningkatan kualitas aset dan pekerjaan yang dihasilkan. Adopsi ini berdasarkan proyek-proyek ILO dari tahun 2006 hingga saat ini yang menerapkan pendekatan LRB dalam pemulihan bencana dan mitigasi perubahan iklim. Kementerian Ketenagakerjaan telah menggunakan pendekatan baru ini di lima kota: Jombang, Nganjuk, Bantul, Pandeglang dan Wonosobo pada 2014.

Didukung oleh:





Capaian Tahun 2014:

1. **Pembangunan lima jembatan.**
Sebanyak tiga jembatan gantung sepanjang 45,5 meter di Jombang dan Nganjuk, Jawa Timur dan di Bantul, Yogyakarta; satu jembatan sepanjang 57,4 meter di Pandeglang, Banten; dan satu jembatan sepanjang 62,5 meter di Wonosobo, Jawa Tengah.
2. **Penciptaan 26.100 hari kerja atau 660 pekerjaan jangka pendek** di setiap lokasi. Sekitar 38 persen dari anggaran proyek ini digunakan untuk membayar pekerja.
3. **Peningkatan kapasitas lokal dengan mengembangkan keterampilan lima pengawas jembatan** (satu penyelia per lokasi).
4. **Penguatan kapasitas untuk pemantauan dan evaluasi** dengan memperkenalkan metodologi evaluasi dampak dan melatih 30 enumerator mengenai metodologi ini (empat peneliti per desa dan dua pegawai Dinas Tenaga Kerja per kabupaten).
5. **Pelatihan bagi 15 pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan petugas Infrastruktur Padat Karya** sebagai pelatih kepala untuk pemeliharaan jembatan berbasis masyarakat (tiga orang per desa).
6. **Pelatihan bagi 40 anggota masyarakat mengenai pemeliharaan jembatan berbasis masyarakat** (delapan orang per desa).

Target Tahun 2015:

- Membangun empat jembatan gantung di tiga kabupaten dan dua jembatan rangka baja (truss bridge) di dua kabupaten.
- Membangun satu unit jaringan pipa air gravitasi di Desa Merabu, Berau, Kalimantan Timur.
- Mengembangkan program percontohan pekerjaan umum di 26 lokasi sasaran di seluruh Indonesia.
- Membangun jalan desa di 18 lokasi sasaran sepanjang 18.000 meter.
- Mengembangkan program percontohan pekerjaan umum untuk "pekerjaan hijau", yang difokuskan pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Semua kegiatan ini akan menciptakan 4.100 pekerjaan jangka pendek (132.138 hari kerja) dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal untuk jangka yang lebih panjang

Suparman: “Jembatan ini membuka akses terhadap pasar dan jasa yang membantu mata pencarian kami”



Supaman, petani singkong berusia 45 tahun, dari Desa Slukatan, Wonosobo, Jawa Tengah, tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk membawa hasil panen jagungnya ke pasar. Ia tidak perlu lagi melalui jalan terjal dan jembatan bambu yang sempit untuk menyeberang sungai.

“Dulu kami harus melalui jembatan berlumpur dan licin saat musim hujan,” katanya, sambil menunjukkan jembatan gantung baru yang dibangun masyarakat

setempat dengan bantuan dari program Infrastruktur Padat Karya Kementerian Ketenagakerjaan.

Jembatan sepanjang 62,5 meter ini diresmikan Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, pada Januari lalu. Untuk memastikan daya tahan jembatan gantung ini, Menteri Hanif menggunakan sepeda motor saat peresmian. Acara peresmian tersebut dihadiri para pejabat Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dari tiga provinsi sasaran (Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten).

“Jembatan ini adalah jawaban atas doa kami selama ini. Kami, masyarakat setempat, memperoleh banyak manfaat dari jembatan ini dan kami yakin mampu bertahan lama. Karena kami sendiri yang membangun jembatan ini dengan bantuan Program Padat Karya dan ILO, kami pula yang akan memastikan perawatannya,” tegas Suparman, ayah dari tiga orang anak itu.

Suparman adalah salah seorang anggota kelompok pemelihara jembatan. Bersama tujuh warga desa lain, ia diberi pelatihan tentang cara memelihara jembatan. Kelompok ini bertanggungjawab untuk memastikan pemeliharaan rutin jembatan tersebut.

“Kami tidak mau kembali ke masa lalu saat kami harus berjuang membawa hasil

”
Jembatan ini adalah jawaban atas doa kami selama ini. Kami, masyarakat setempat, memperoleh banyak manfaat dari jembatan ini dan kami yakin mampu bertahan lama. Karena kami sendiri yang membangun jembatan ini dengan bantuan Program Padat Karya dan ILO, kami pula yang akan memastikan perawatannya

panen kami dan berjalan selama berjam-jam untuk bisa ke pasar. Kami ingin memastikan anak-anak kami bisa pergi ke sekolah dengan aman dan mudah. Kami yakin jembatan ini akan membawa masa depan yang lebih baik karena ia membuka akses yang lebih baik bagi kami semua,” katanya. ❖

Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur



Sekilas:

Saat ini hampir satu miliar penduduk dunia mengalami kelaparan kronis. Di saat yang sama kenaikan harga pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya memperburuk masalah kelaparan, kemiskinan, pengangguran, keresahan sosial dan ketidakstabilan politik. Untuk mengatasi persoalan ini, program ILO, "Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan", bertujuan untuk mempromosikan ketahanan pangan melalui sistem pangan yang lebih baik dengan memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan layak yang didukung hak-hak di tempat kerja, perlindungan sosial dan dialog sosial. Pekerjaan layak dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produksi dan pengolahan pangan, meningkatkan akses serta menyediakan penghasilan agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dan menjamin ketersediaan pangan mereka.

Di Indonesia, proyek ini berupaya mempromosikan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan bagi masyarakat desa di kabupaten-kabupaten yang paling rentan dan tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan kesempatan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan layak, serta memperluas kesempatan wirausaha dalam rantai nilai tanaman pangan yang penting—terutama jagung, rumput laut dan hewan ternak—yang memiliki potensi pekerjaan dan penghasilan yang tinggi.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. Pelaksanaan pelatihan mengenai pengembangan rantai nilai bagi 25 aparat pemerintah, aktivis LSM, pekerja dan organisasi pengusaha.

2. Pengembangan rantai nilai yang partisipatif di 13 desa sasaran dan empat kecamatan di Kabupaten Kupang (salah satu kabupaten sasaran) untuk tiga jenis komoditas: jagung, hewan ternak dan rumput laut.

3. Pelatihan untuk Pelatih mengenai Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan dengan menggunakan modul ILO mengenai GET Ahead, Pengembangan Usaha Berbasis Masyarakat (C-BED) dan Literasi Keuangan bagi 22 peserta dari kalangan pemerintah, serikat

pekerja, organisasi pengusaha dan LSM lokal.

4. Penilaian teknis mengenai hewan ternak dan jagung di tiga kecamatan sasaran.

5. Pelatihan teknis untuk pelatih tentang peternakan dan pembudidayaan jagung bagi 40 tokoh petani di 13 desa sasaran.

6. Pelatihan teknis tentang pembudidayaan rumput laut bagi 110 pengusaha rumput laut mengenai peningkatan produksi.

7. Pelaksanaan pelatihan bagi 500 pengusaha rumput laut, petani jagung dan peternak skala kecil di 13 desa sasaran mengenai kewirausahaan dan literasi keuangan.

8. Finalisasi dokumen program bersama ILO-FAO mengenai pekerjaan layak untuk ketahanan pangan.



Target Tahun 2015:

- Mengadakan lokakarya teknis untuk mengembangkan kapasitas Forum Pembangunan Ekonomi Lokal di Provinsi NTT (yang baru saja dibentuk Gubernur NTT).
- Proyek percontohan inisiasi pasar sedang berlangsung, di mana dua LSM lokal dan satu universitas telah dilatih sebagai Penyedia Layanan Pengembangan Usaha (BDSP) untuk membantu para petani agar dapat meningkatkan akses atas pasar dan informasi tentang harga, kemampuan berdagang, keterampilan negosiasi dan pilihan pasar.
- Menggunakan hasil survei awal terbaru di tingkat rumah tangga di Kupang dan melaksanakan kegiatan keuangan mikro dan/atau asuransi mikro. Kelompok swadaya akan dibentuk di dua atau empat desa, berdasarkan penilaian kompatibilitas kelompok.
- Mengadakan pelatihan tentang Peningkatan Kerja dalam Lingkungan Sekitar (WIND) yang difokuskan di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Melanjutkan pendampingan setelah pelatihan melalui BDSP dan LSM lokal bagi para peserta pelatihan kewirausahaan.
- Mendukung lokakarya yang diadakan para mitra lokal untuk menyediakan pelatihan kerja bagi kelompok peserta yang belum menerima pelatihan tersebut.
- Mengadakan lokakarya untuk mengelola kelompok kerja dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan rencana aksi pembangunan rantai nilai/pembangunan desa di tingkat provinsi (termasuk para aktor di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten).
- Menyelenggarakan kunjungan bagi para pembuat kebijakan dari pemerintah daerah NTT ke lokasi-lokasi proyek serta melakukan tindak lanjut.

Mempromosikan pekerjaan layak dalam Agenda Ketahanan Pangan di NTT

Pekerjaan layak merupakan jalan keluar penting dari kemiskinan dan kelaparan. Berdasarkan pengalaman dan keberhasilannya dalam melaksanakan proyek ketenagakerjaan dan menghasilkan pendapatan, ILO kini mengujicoba Proyek Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu daerah tertinggal dan terisolir di Indonesia, selama satu tahun.

Tujuan utama proyek percontohan ini adalah mempromosikan kelangsungan mata pencarian para pekerja dan keluarga mereka melalui pekerjaan layak dalam rantai nilai hasil pertanian yang berpotensi menyediakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan serta produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai sasaran ini, Proyek difokuskan pada tiga jenis rantai nilai yang diidentifikasi di NTT, terutama di empat kabupaten: Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Belu dan Sumba timur.

Tahun ini, Proyek akan difokuskan di Kabupaten Kupang dengan tiga jenis komoditas, yaitu hewan ternak, jagung dan rumput laut. Salah satu daerah sasaran di kabupaten ini adalah Pulau Semau. Pulau ini ditetapkan sebagai prioritas utama bagi program ketahanan pangan di NTT karena karakteristiknya sebagai salah satu daerah tertinggal di negeri ini. Pulau yang terletak di tenggara Indonesia ini hanya dapat diakses melalui kapal selama setengah jam dari pelabuhan Kupang.

Tiga desa di Pulau Semau sudah disasarkan sebagai klaster dengan fokus utama meningkatkan potensi pekerjaan layak serta mengamankan ketersediaan dan akses pangan. Setelah penilaian

”
Kami sudah
membudidayakan
rumput laut sejak tahun
2000. Kadang-kadang
hasil panen bagus dan
menjanjikan, tapi di lain
waktu wabah penyakit
menghancurkan rumput
laut kami sehingga kami
tidak memperoleh hasil
apa-apa

awal dilakukan dari sisi penawaran dan permintaan, pembudidayaan rumput laut dipilih sebagai salah satu komoditas utama.

”Saat melakukan pendekatan dengan warga setempat, pada awalnya mereka sempat ragu-ragu. Berbeda dari kegiatan program yang lain, proyek percontohan ILO ini tidak menawarkan uang atau bantuan tunai. Namun, setelah turut serta dalam sesi-sesi pelatihan tentang pengembangan rantai nilai, mereka mulai memperlihatkan minat, terutama saat belajar tentang cara meningkatkan produktivitas dan memperoleh keuntungan lebih besar dari kerja keras mereka,” kata Yuniirwan Gah, Manajer Proyek Ketahanan Pangan ILO, menjelaskan mengenai respons masyarakat setempat terhadap kegiatan Proyek ini.

Sementara itu bagi Tince, Fince dan Dortia, yang lahir dan tinggal di Pulau Semau sepanjang hidup mereka, kegiatan rantai nilai ini memberi harapan baru. “Ya, kami semua bekerja di sektor rumput laut, bawang merah, beras dan jenis perkebunan lain. Kami juga beternak kambing dan sapi,” kata ketiga perempuan setengah baya ini serentak seraya menjaga cucu-cucu mereka.

Seperti lainnya sebagian besar warga desa di pulau ini, keluarga mereka juga bekerja di bidang pembudidayaan rumput laut sebagai sumber penghasilan utama. Semua anggota keluarga, termasuk anak-anak, terlibat dalam usaha keluarga ini.

Di samping itu, pemasaran dan harga jual menjadi masalah utama bagi warga setempat. Karenanya, mereka menyambut baik setiap bantuan terkait pengembangan usaha mereka. “Biasanya kami tidak melakukan tawar-menawar. Untuk apa? Kami tidak punya kapasitas dan kami sama sekali tidak tahu cara bernegosiasi dengan pengumpul atau pembeli. Kami hanya tergantung pada berapapun harga yang ditetapkan pengumpul untuk hasil panen kami,” kata Fince.

Akibatnya, kata Dortia, sebagian besar warga desa terpaksa menjual apa saja yang mereka miliki di saat menghadapi keadaan darurat atau meminjam uang kepada siapa saja yang bisa. Jadi, mereka berharap dengan adanya pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik tentang cara mengembangkan dan mengelola sumber daya lokal, seperti rumput laut, warga desa dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar dan meningkatkan taraf hidup mereka. ❖



Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan Indonesia

Sekilas:

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi kewirausahaan sebagai salah satu cara penting dalam mengatasi tingkat pengangguran serta untuk menanggulangi kemiskinan. Di saat yang sama, Indonesia menghadapi berbagai tantangan di bidang lingkungan di mana Presiden Indonesia telah berjanji mengurangi emisi setara CO₂ sebesar 26 persen dengan inisiatif sendiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut, ILO dengan dukungan awal dari Program Kemitraan ILO-Korea telah memperkenalkan Program Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan Indonesia, dan sejak tahun 2014 pendanaan dilanjutkan oleh ILO.

Program ini berupaya memberikan bantuan bagi para pengusaha berwawasan lingkungan di daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, mendukung pergeseran ke perekonomian yang berwawasan lingkungan, serta mendorong tumbuhnya pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja yang berwawasan lingkungan serta penurunan emisi gas rumah kaca di beberapa sektor perekonomian. Program juga bertujuan mendukung para pemangku kepentingan Indonesia dalam mengembangkan alat bantu mengenai kewirausahaan berwawasan lingkungan dengan konteks Indonesia berdasarkan pada Perangkat Kewirausahaan Berwawasan Lingkungan ILO (ILO Green Entrepreneurship Toolkit/SYGB), serta memberikan aktivitas peningkatan kapasitas dan membentuk sebuah program nasional untuk kewirausahaan berwawasan lingkungan.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Adaptasi modul-modul “Memulai Usaha Berwawasan Lingkungan Anda” (Start Your Green Business/SYGB).** Modul-modul ini bertujuan meningkatkan usaha yang ada dan di saat yang sama mengintegrasikan aspek-aspek wawasan lingkungan ke dalam usaha mereka.
2. **Penerapan Pelatihan Dasar Pekerjaan Ramah Lingkungan (Green Jobs Foundation Training) bagi 15 pelatihan SYGB/SIYB (Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda).** Pelatihan ini memberikan para pelatih pemahaman yang lebih baik mengenai kajian perubahan iklim, keterkaitan antara lingkungan, perekonomian dan ketenagakerjaan serta pentingnya konsep manusia, keuntungan dan planet (3P).
3. **Penerapan Bantuan Pasca-Pelatihan SYGB bagi wirausaha berwawasan lingkungan baru di daerah Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat.** Sekitar enam pengusaha yang peduli lingkungan didampingi dalam mempersiapkan dan memulai usaha mereka yang lebih ramah lingkungan, mencakup beragam bentuk usaha dari pakaian, pengolahan makanan hingga agen perjalanan.
4. **Penerapan Bantuan Pasca-Pelatihan SYGB bagi wirausaha berwawasan lingkungan baru di Makassar, Sulawesi Selatan.** Lima calon pengusaha yang peduli lingkungan didampingi dalam

mempersiapkan dan memulai usaha mereka yang lebih ramah lingkungan, mencakup beragam sektor usaha seperti perkebunan jamur, cendera mata dan pakaian.

5. **Pelaksanaan pelatihan untuk pengusaha mengenai SYGB, bekerja sama dengan Bank Indonesia.** Pelatihan ini diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara dan diikuti 26 pengusaha berwawasan lingkungan baru yang mayoritas sudah memulai usaha mereka yang lebih ramah lingkungan.

Target Tahun 2015:

- Program ILO-IGEP bersama dengan Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang akan menyelenggarakan Pelatihan untuk Pengusaha mengenai SYGB bagi pekerja migran yang sudah kembali dengan partisipasi peserta sebanyak 20 orang.
- Sebagai bagian dari program pelatihan yang komprehensif, sebagai lanjutan dari Pelatihan untuk Pengusaha mengenai SYGB, pelatihan mengenai Pendidikan Keuangan akan diberikan kepada pekerja migran yang sudah kembali untuk memperkuat pengetahuan mereka mengenai pengelolaan keuangan.
- Pelatihan untuk Pelatih mengenai direncanakan pada semester kedua tahun 2015 dengan sasaran para instruktur dari balai-balai pelatihan kerja milik pemerintah provinsi dan kabupaten di Jawa Barat. Kegiatan ini sejalan dengan prakarsa pemerintah Indonesia untuk membentuk pusat pelatihan kejuruan untuk kewirausahaan.

Ilham Rhamanda mungkin merupakan salah seorang pengusaha yang paling bahagia di Bandung. Sebagai pengusaha muda yang sukses, ia dan saudaranya mengelola pabrik pakaian olahraga yang sudah mapan dan berkembang pesat, serta terkenal akan rancangan orisinilnya. Mereka memiliki 12 pekerja dan memasok pakaian olahraga ke sejumlah pusat perbelanjaan di ibukota Jawa Barat. Tapi entah mengapa bila melihat masa depan, pengusaha berusia 34 tahun dan ayah dari seorang anak perempuan berusia 2 tahun ini masih merasa belum puas.

Suatu hari ia melihat limbah air mengalir keluar dari pabriknya dan masuk ke kali kecil di sekitar pabrik. Ia tahu pabrik pakaian olahraganya, seperti halnya usaha kecil menengah (UKM) lain di, berkembang dengan mengorbankan kualitas lingkungan, dan menimbulkan banyak limbah, sampah dan polusi industri. Sehingga menciptakan bisnis yang menguntungkan dan ramah lingkungan tampaknya merupakan “teka-teki besar” baginya.

Oleh karena itu, saat diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan Start Your Green Business (SYGB), yang diselenggarakan ILO, Ilham langsung menerimanya.



Pengusaha Muda Indonesia Peduli Lingkungan

"Praktik bisnis yang baik perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat, dan bukan sekedar memikirkan keuntungan semata," katanya. "Karena ia sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan bisnis kita."

Pendapat tradisional menyatakan 'sejahtera dulu, bersihkan nanti' tapi kita tidak dapat terus sejahtera jika kita merusak lingkungan, atau jika kita tidak memperhatikan pekerja kita," kata Lorraine Villacorta, Spesialis bidang Lingkungan dan Pekerjaan Layak ILO. "Untungnya, para pengusaha, terutama pengusaha muda di Indonesia, sudah menyadari hal itu. Apa yang mereka butuhkan adalah pengetahuan dan keahlian untuk mempraktikkan ide mereka. Dan disitulah ILO hadir."



Lorraine menyatakan bahwa "ramah lingkungan" tidak saja berarti mengurangi dampak bisnis Anda terhadap lingkungan tapi juga memenuhi standar pekerjaan layak, seperti kondisi kerja yang aman, upah yang memadai, pemenuhan hak pekerja, dialog sosial dan perlindungan sosial. Selama pelatihan SYGB ini, pelatih menjelaskan tentang prinsip, kebijakan dan praktik ini. Mereka membantu Ilham dan rekan pengusaha lain untuk mengusulkan sejumlah ide tentang bisnis yang ramah lingkungan, termasuk di bidang pangan dan pertanian, pariwisata, pengelolaan limbah dan daur ulang, energi terbarukan dan industri kreatif.

Pelatihan ini membantu Ilham menemukan solusi untuk limbah beracun dan bahan kimia yang keluar dari pabriknya. Pelatihan ini menyediakan panduan tentang cara memasang saringan atau filter yang terbuat dari palem fiber, karbon aktif dan kotak sedimentasi untuk menghilangkan kotoran dan limbah yang dihasilkan dari *washing screen prints*, tinta dan cairan kimia serta mencegah air limbah yang belum diproses masuk ke saluran dan kali di sekitarnya.

Harga filter terjangkau, mudah dipasang dan dioperasikan, ini berarti harga produk masih kompetitif. Pekerja juga merasa lebih senang. Ia sudah mulai mempromosikan aspek 'hijau' dari bisnisnya dan sedang memikirkan ide baru, seperti pemakaian tinta yang ramah lingkungan untuk screen printing. "Rencana saya yang lain adalah lebih menghijaukan bisnis saya yaitu dengan mengembangkan merek kami sendiri dengan bahan mentah organik dan tinta

”

Kegiatan bisnis saya sudah tidak membahayakan lingkungan lagi dan warga setempat dapat menikmati air bersih. Sekarang, saya tidak perlu khawatir lagi, dan demikian pula halnya pelanggan kami.

“

alami," katanya. Untuk jangka panjang, ia ingin memperluas bisnisnya dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi warga setempat.

Pelatihan ini juga menawarkan jaringan dan peluang usaha penting bagi pengusaha muda. Ilham kini menjual potongan kain sisa pakaian olahraganya ke perusahaan lain, yang memproduksi aksesoris jilbab dan busana perempuan.

Sejauh ini, pelatihan SYGB telah membantu hampir 200 orang pengusaha di enam provinsi di Indonesia untuk mengimbangi ambisi bisnis mereka dengan masalah perubahan iklim dan lingkungan di sekitar mereka, dengan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan atau dengan menggunakan proses produksi yang ramah lingkungan.

Pelatihan SYGB didukung oleh Program Kemitraan ILO/Korea melalui Program Green Jobs untuk kawasan Asia Pasifik. ❖

Program Daya Saing Usaha Kecil ASEAN



Sekilas:

Pangsa usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) di Asia Tenggara mencapai lebih dari 90 persen jumlah perusahaan domestik dan menyerap 75-90 persen tenaga kerja non-pertanian. UMKM menyediakan basis pasokan yang mendukung keberhasilan dan produktivitas perusahaan internasional skala besar. Karenanya UMKM merupakan pondasi penting bagi pengoperasian mereka. Sebagian besar lapangan kerja yang diciptakan di negara-negara Asia Tenggara adalah di sektor informal, dan dilakukan pengusaha usaha mikro, terutama mereka dari kalangan masyarakat marjinal, yang menjadi sasaran proyek ini.

Perangkat (tools) Daya Saing Usaha Kecil (didasari pada pendekatan Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (C-BED) ILO, yang merupakan diversifikasi sektoral dari metodologi pelatihan yang tidak membutuhkan pelatih. Tahap proyek Daya Saing Usaha Kecil saat ini mencakup sektor pariwisata, berdasarkan analisa berbagai faktor seperti: kesamaan praktik yang diterapkan di semua negara ASEAN, ketersediaan saluran distribusi, peluang untuk mengembangkan UKM, hubungan antara Tujuan Pembangunan Milenium yang pro masyarakat miskin, serta pengalaman efektif ILO di sektor dan kawasan ini.

Penerima manfaat langsung dari proyek ini adalah lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah, layanan pengembangan usaha dan proyek pembangunan yang menyediakan layanan serta bantuan untuk UMKM. Sedangkan penerima manfaat akhir adalah para pengusaha di sektor pariwisata, serta masyarakat yang tinggal di lokasi usaha.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Penyelesaian penelitian awal dan pengembangan delapan perangkat.** Dari laporan awal yang diperoleh, sektor pariwisata dipilih, di samping sub-sektor lain yang sesuai. Tahun 2014 digunakan, terutama untuk mengembangkan perangkat serta melaksanakan beberapa kegiatan percontohan untuk terus meningkatkan mutu sarana yang telah dikembangkan tersebut. Menjalin sejumlah kemitraan inovatif dengan berbagai pihak (aparatur pemerintah, LSM, tokoh masyarakat) untuk memperoleh gambaran tentang sejumlah praktik terbaik secara kelembagaan dalam meluncurkan modul pelatihan serta memastikan kelangsungan program.

2. **Penyebarluasan perangkat (sedang dilaksanakan), melalui pembuatan kerangka multi-media dan lokakarya** guna mengidentifikasi dan menginformasikan kepada mitra lokal utama di negara-negara ASEAN mengenai perangkat (toolbox) tersebut. Proyek ini menyediakan perangkat bagi negara-negara ASEAN serta memperluas cakupan penerima manfaat dan perantara potensial. Modularitas pendekatan Daya Saing Usaha Kecil memungkinkan perantara mitra secara mudah memasukkan perangkat ini ke dalam program masyarakat dan program bantuan berbasis sektor yang sudah ada.

Target Tahun 2015:

- Melanjutkan strategi penyebarluasan yang bertujuan untuk memperoleh komitmen dari berbagai pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah maupun lembaga internasional di seluruh kawasan ASEAN untuk memperpanjang pelatihan modul Daya Saing Usaha Kecil hingga mencapai setidaknya 1.000 peserta.
- Mengembangkan materi kampanye (website, video, animasi dan merek).
- Mengadakan Lokakarya untuk Berbagi Pengetahuan tentang "Jalur Pengembangan Perusahaan Mikro di Sektor Pariwisata", bersamaan dengan peluncuran modul.
- Menyelesaikan tahap pengembangan perangkat, yang mencakup 8 sub-sektor yang ditargetkan:

Modul khusus sub-sektor:

- Pemilik penginapan/hotel kecil
- Pemilik rumah inap
- Pengusaha restoran/penjual makanan
- Pembuat kerajinan tangan
- Petani pemilik ladang kecil
- Pedagang pasar (penjual suvenir)

Modul pariwisata generik:

- Pengusaha aspiratif di sektor pariwisata.
- Pengelola tempat wisata (menjalin Kemitraan Pemerintah-Swasta guna mewujudkan pembangunan pariwisata lokal).



Pengusaha lokal merangkul perangkat peningkatan daya saing usaha

Lebih dari 30 mitra lapangan berperan aktif dalam menggelar pelatihan percontohan tentang peningkatan daya saing usaha kecil sehingga mencapai lebih dari 300 orang di Laos, Thailand dan Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri dengan hanya sedikit bantuan dari luar/ILO. Pelatihan percontohan ini mencakup tujuh dari delapan modul peningkatan daya saing usaha yang dirancang untuk memperoleh masukan interaktif agar dapat menyempurnakan modul-modul tersebut. Proyek Daya Saing Usaha Kecil menguji-cobakan berbagai cara dengan hasil berikut:

- Melalui pelaksanaan tiga tahap untuk menyerahkan “tongkat estafet” dari pelatihan yang dikelola LSM ke pelatihan yang dikelola masyarakat di Vang Vieng, Laos.
- Melalui gerakan pariwisata berbasis desa di 100 desa yang dikelola asosiasi pariwisata (misalnya, Bali).
- Melalui lembaga atau dinas pariwisata di tingkat provinsi/nasional (mengalir dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten (misalnya, Dinas Pariwisata Sumatera Barat).
- Melalui rencana pengembangan kapasitas UKM kementerian di tingkat nasional, perangkat ini diadopsi dalam sejumlah rencana strategis

pembangunan pariwisata desa (misalnya, Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia atau inisiatif Satu Tambon Satu Produk di Thailand).

Proyek ini bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam mengakomodasi dan memfasilitas lokakarya (yaitu dengan memanfaatkan biara, kuil, sekolah, kantor desa, restoran lokal sebagai tempat pelatihan dan restoran lokal sebagai penyedia makanan bagi peserta). Melalui uji coba ini, modul-modul yang dikembangkan terbukti mudah dilaksanakan, dan hanya membutuhkan panduan dan sumber daya minimal dari ILO. Dikarenakan sifat intuitif dari modul-modul tersebut,



kepemilikan modul dengan mudah diambil alih dan diaplikasikan sendiri oleh masyarakat. ❖



Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Mengintegrasikan Pekerjaan yang Lebih Baik dan Menciptakan Kesejahteraan Bersama

Sekilas:

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan menjadi pasar dan basis produksi tunggal di tingkat regional akan diberlakukan di tahun 2015 bagi 600 juta penduduk yang tinggal di 10 negara anggota ASEAN. Pasar ini akan menghasilkan aliran barang, jasa, investasi dan pekerja terampil secara lebih bebas di kawasan ini. Peluang baru untuk pertumbuhan dan kesejahteraan mungkin akan muncul, namun tantangannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan kesejahteraan dapat dinikmati secara bersama. Untuk itu, ILO dan Bank Pembangunan Asia (ADB), dengan dukungan Sekretariat ASEAN, melakukan sebuah penelitian bertajuk "Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Mengelola Integrasi untuk Pekerjaan yang Lebih Baik dan Menciptakan Kesejahteraan Bersama". Laporan ini meneliti dampak penerapan MEA terhadap pasar kerja serta menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti yang ada agar dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan pertumbuhan yang adil, termasuk dengan memperkuat kerjasama regional, memfasilitasi perubahan struktural, meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki keterampilan pekerja, meningkatkan produktivitas dan upah, serta mengelola migrasi pekerja.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Penelitian tentang MEA 2015**, yang menyediakan analisa kebijakan dan rekomendasi tentang pengelolaan integrasi untuk pekerjaan yang lebih baik dan kesejahteraan bersama.
2. **Penyusunan ringkasan proyek tiap negara yang menguraikan tentang potensi dampak penerapan MEA 2015** terhadap pasar kerja Indonesia.

Target Tahun 2015:

- Menganalisa secara mendalam di tingkat negara terkait penerapan MEA.
- Memobilisasi partisipasi para konstituen dalam dialog kebijakan tentang MEA 2015 serta mengidentifikasi tindakan untuk mendukung pertumbuhan yang mampu menghasilkan banyak lapangan kerja dalam konteks integrasi.

”

Untuk mewujudkan potensi penuh dari integrasi perekonomian ini secara lebih mendalam, negara-negara di kawasan ini perlu mengambil langkah secara nyata

“

Para pembuat kebijakan sering membahas tentang dampak penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Tapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana MEA dapat memberi dampak terhadap 600 juta penduduk yang tinggal di

Adakah dampak Masyarakat Ekonomi



kawasan ini? Masyarakat umum pertama dan terlebih dahulu akan mengalami perubahan ekonomi melalui pasar kerja. Bagi mereka, yang terpenting adalah apakah dapat memperoleh pekerjaan yang menyediakan keamanan, upah wajar dalam kondisi kerja yang layak, dan apakah anak-anak mereka pada gilirannya nanti juga dapat memperoleh hal serupa.

Analisa dalam laporan MEA 2015 menegaskan bahwa MEA dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini sebesar 7,1 persen pada 2025, dan menghasilkan 14 juta lapangan kerja baru. Namun dengan adanya perubahan struktural

ASEAN 2015 terhadap penduduk ASEAN?

ini, beberapa sektor akan mengalami perkembangan pesat, sementara yang lain mungkin akan kehilangan pekerjaan. Untuk itu, lembaga pasar kerja perlu membantu pekerja dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka agar dapat memperoleh keuntungan dari peluang baru yang diciptakan MEA. Di samping itu, peningkatan produktivitas mungkin akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi sebagian orang, tapi juga dapat mengurangi pendapatan sebagian besar orang, kecuali bila ada lembaga penetapan upah yang mampu berfungsi secara efektif.

Untuk mewujudkan potensi penuh dari integrasi perekonomian ini secara lebih mendalam, negara-negara di kawasan ini perlu mengambil langkah secara nyata. Ini adalah pesan penting yang diambil dari penelitian tentang “Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Mengelola Integrasi untuk Pekerjaan yang Lebih Baik dan Menciptakan Kesejahteraan Bersama”. Laporan ini menyorot tiga prioritas yang perlu difokuskan para pemimpin ASEAN, yakni:

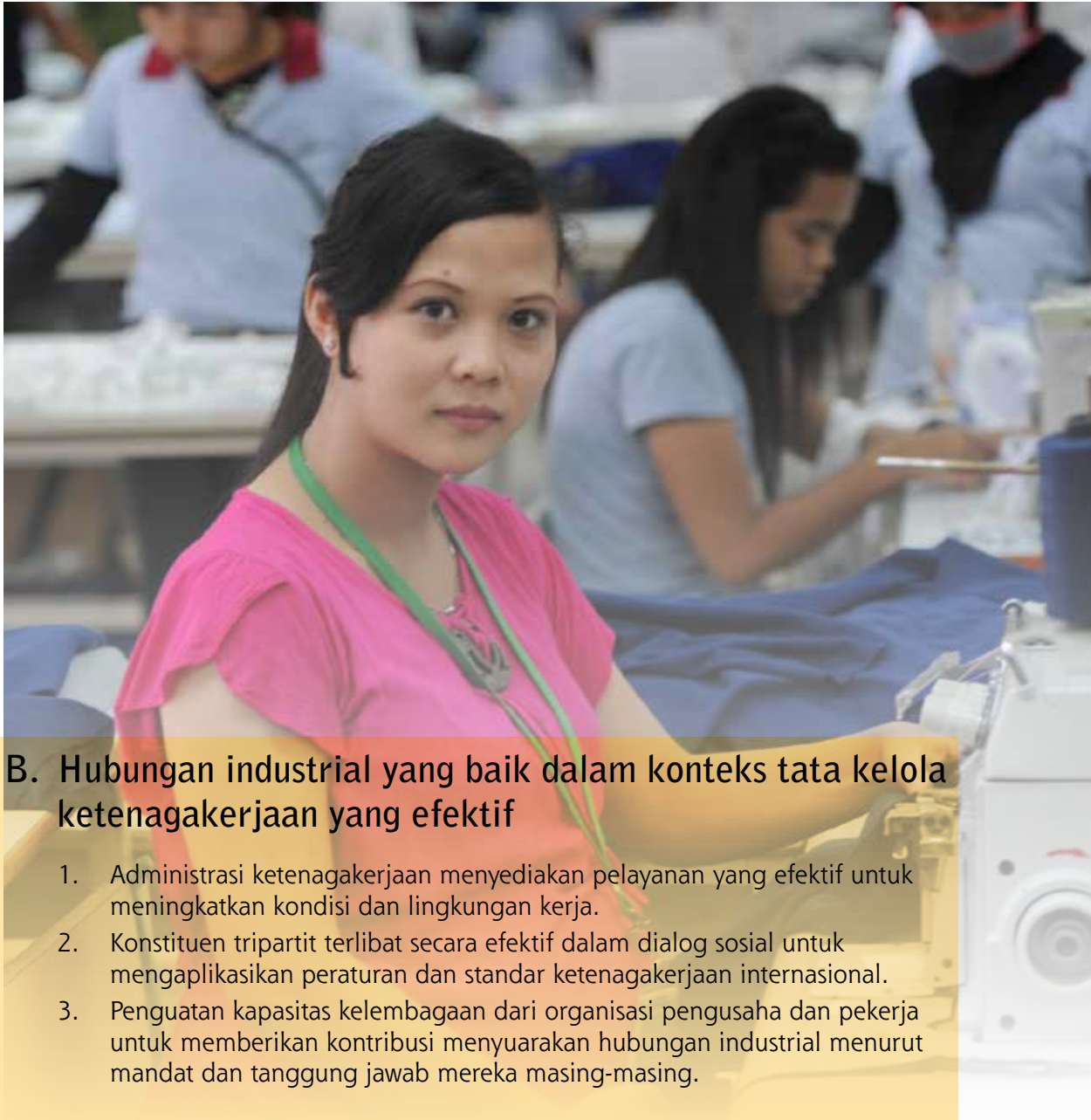
- Pertama, mengelola dan memfasilitasi perubahan struktural secara proaktif. Upaya ini tidak saja berarti menanamkan investasi di bidang prasarana dan melaksanakan kebijakan sektoral dan industri secara efektif. Tapi juga memperbaiki prasarana ‘lunak’ yaitu dengan menanamkan investasi di bidang sistem pendidikan

dan pelatihan kerja yang lebih baik agar keterampilan pekerja dapat disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Untuk memastikan keberhasilannya, proses penyesuaian ini butuh dukungan dari usaha kecil menengah (UKM) dan anggota masyarakat yang paling rentan. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat.

- Kedua, hasil ekonomi harus mampu menghasilkan kesejahteraan bersama. Dengan menghubungkan upah dengan produktivitas, pekerja dapat memperoleh manfaat dari kemajuan ekonomi sementara perusahaan masih tetap kompetitif. Hal ini membutuhkan adanya sistem penetapan upah secara efektif yang dapat menetapkan upah minimum yang mampu melindungi pekerja yang paling rentan, dan prosedur perundingan bersama yang lebih kuat agar pengusaha dan serikat pekerja dapat menegosiasikan peningkatan kondisi kerja dan mencari solusi yang mampu meningkatkan produktivitas.
- Ketiga, negara-negara ASEAN perlu memperkuat kerjasama

regional. Sebagian dari kerangka kerjasama regional ini sudah ada. Sebagai contoh, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempromosikan pekerjaan layak, pekerjaan yang manusiawi, produktif, bermartabat dan upah yang baik untuk pekerja migran melalui Deklarasi Cebu. Dan dalam Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Sosial, mereka telah menetapkan prinsip akses yang adil atas perlindungan sosial. Kini dibutuhkan tindakan nyata untuk mewujudkan apa yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut menjadi sebuah perubahan nyata. Kerjasama juga perlu diperluas hingga mencakup bidang-bidang lain, seperti pengakuan terhadap keterampilan pekerja, informasi, penelitian dan analisa tentang pasar tenaga kerja.

MEA 2015 akan menempatkan kawasan ASEAN pada persimpangan jalan. Jika ketiga prioritas tersebut dilaksanakan secara efektif, maka kawasan ini dapat menikmati kemajuan besar dalam pembangunan ekonomi yang adil dan kesejahteraan bersama. Namun sebaliknya, jika para pemimpin ASEAN gagal melaksanakannya, maka MEA mungkin akan memperluas ketidaksetaraan, sehingga hasil dari integrasi perekonomian akan merugikan sebagian besar penduduk di kawasan ini. ❖



B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarakan hubungan industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing.



Better Work Indonesia

Sekilas:

Better Work Indonesia (BWI) merupakan program kemitraan antara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Korporasi Keuangan Internasional (IFC). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan standar ketenagakerjaan dan meningkatkan daya saing dalam rantai pasokan global. Fokus BWI adalah pada solusi yang terukur dan berkelanjutan melalui penguatan kerjasama antara pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja serta pembeli internasional. Perlindungan hak-hak pekerja mampu menyebarkan keuntungan dari kegiatan perdagangan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, sosial dan ekonomi. Kepatuhan pada berbagai standar ketenagakerjaan dapat membantu perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif, dengan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas dan para pembeli baru. BWI memadukan penilaian independen terhadap perusahaan dengan layanan pendampingan dan pelatihan untuk mendukung perbaikan nyata melalui kerjasama di tempat kerja.

Didukung oleh:



BetterWorkIndo



Better Work Indonesia

Capaian Tahun 2014:

1. **Pendaftaran 121 pabrik di dalam program BWI** dengan lokasi Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat (Bandung, Sukabumi dan Majalengka) dan Jawa Tengah (Semarang) dan Yogyakarta (Sleman).
2. **BWI kini menjangkau lebih dari 245.000 pekerja** melalui sejumlah intervensi dan programnya.
3. **Terdapat 22 pembeli internasional skala besar** yang membeli produk dari pabrik-pabrik Indonesia yang telah terdaftar di BWI. Terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi pembeli yang ingin mendaftarkan pabrik mereka dalam program ini. Forum pembeli ketiga juga telah dibentuk pada akhir Juni 2014.
4. **Publikasi laporan sintesa keempat** BWI memperlihatkan adanya peningkatan kepatuhan perusahaan berdasarkan penelitian kedua dan ketiga.
5. **Peluncuran proyek percontohan untuk meningkatkan akses**

penyandang disabilitas ke pekerjaan layak di sektor garmen, bekerja sama dengan balai latihan swasta. Pelatihan gratis ini dilaksanakan selama dua bulan, dengan diikuti 43 operator jahit sesuai standar yang ditetapkan industri garmen. Selama pelatihan, perusahaan garmen internasional yang bermitra dengan BWI mengunjungi pelatihan untuk memberi kesempatan kepada para peserta bekerja di perusahaan mereka.

6. **Pelaksanaan sejumlah pelatihan tentang keterampilan pengawasan terhadap lebih dari 600 penyelia dari 22 pabrik.** Pelatihan ini didanai oleh Disney Foundation dan merupakan jenis pelatihan yang paling banyak peminatnya pada 2014.
7. **Pengembangan *mobile website* untuk membantu pekerja dalam menghitung upah lembur.** Mobile website telah secara aktif dipromosikan oleh federasi-federasi yang terlibat dalam Better Work.

8. **Peningkatan kapasitas untuk konstituen tripartit BWI** melalui serangkaian pelatihan tentang kebebasan berserikat dan perundingan bersama.
9. **Peningkatan persentase jumlah perusahaan yang terdaftar di BWI yang memiliki setidaknya satu serikat pekerja**, yaitu dari 47 persen di tahun 2013 menjadi 62 persen pada tahun 2014.
10. **Mendukung inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan tentang Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK)** yang diwajibkan berdasarkan Keputusan Menteri No. 257 Tahun 2014 dengan melaksanakan serangkaian program berbagi pengetahuan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BWI, pengawas ketenagakerjaan di tingkat lokal dan pembeli/merek internasional. Keputusan Menteri ini mewajibkan semua pabrik untuk memiliki KNK yang bertugas untuk melaksanakan penilaian di tingkat perusahaan.
11. **Penyebarluasan informasi tentang BWI melalui situs BWI** (hingga saat ini terdapat 50.000 pengunjung) dan media sosial seperti Facebook (dengan 22.498 likes) dan Twitter (dengan 1.332 followers).



Target Tahun 2015:

- Menyesuaikan model pemberian layanan nasihat dan penilaian. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan oleh pabrik melalui revisi edaran.
- Memberikan masukan teknis untuk pengembangan perangkat (*tool*) penilaian melalui pengawasan ketenagakerjaan yang sesuai dengan inisiatif pemerintah.

Meningkatkan kemampuan guna memperoleh kesempatan yang lebih besar

"Dulu saya tidak percaya diri, tapi sekarang tidak lagi demikian," kata Mardiana, 27 tahun, salah satu dari 43 penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pelatihan menjahit yang diadakan Better Work Indonesia (BWI).

Mardiana sedang belajar di pesantren saat menerima pesan singkat (SMS) dari salah seorang temannya tentang pelatihan khusus penyandang disabilitas untuk belajar keterampilan menjahit. Kendati orangtuanya memainkan peran penting dalam memastikan pendidikan dan menanamkan rasa percaya diri, namun ia sering merasa dibatasi oleh disabilitas yang disandangnya. Selain itu Mardiana juga merasa khawatir akan jenis pekerjaan yang mampu dilakukannya. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke Semarang dan berpartisipasi dalam pelatihan BWI.

"Saya merasa beruntung dapat berpartisipasi di sini. Saya memahami dan mampu melaksanakan apa yang diajarkan oleh instruktur. Saya ingin memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan ini, ingin memperoleh upah dari hasil keringat sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain," tegasnya.

Berdasarkan data ILO, terdapat 24 juta penduduk di Indonesia (10 persen dari jumlah total penduduk) yang menyandang disabilitas, tapi hanya 11 juta di antaranya yang bekerja.

BWI, dengan dukungan ILO, menggelar proyek percontohan untuk membantu penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan di sektor garmen. Para peserta dilatih sebagai penjahit sesuai standar yang ditetapkan industri garmen. Tujuannya untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas atas pekerjaan layak dengan menyediakan pelatihan kerja, bekerja sama dengan balai latihan

Tujuannya untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas atas pekerjaan layak dengan menyediakan pelatihan kerja

swasta di Semarang, Griya Inti Apac (Gripac) dan BP SDM. Proyek percontohan ini didanai Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT).

"BWI yakin proyek percontohan ini berhasil meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta sehingga mereka kini siap memasuki pasar kerja, terutama di sektor garmen. Di samping itu, BWI juga yakin penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang sama kompetitifnya di pasar kerja jika mereka diberi kesempatan



yang adil," kata M. Anis Nugroho, Manajer Operasional BWI.

Kegiatan ini tidak berakhir begitu saja saat pelatihan selesai. Setelah pelatihan, BWI membantu para peserta dalam memperoleh pekerjaan. Program ini juga telah mensurvei beberapa industri garmen, dan hasil survei menunjukkan penyandang disabilitas tidak berada dalam daftar pencari kerja yang masuk ke perusahaan mereka.

"Pelatihan ini memungkinkan saya memperoleh mata pencarian untuk anak dan istri saya," kata salah seorang peserta, Abdul Karim. "Kini saya siap bekerja di industri garmen. Saya bisa membuat pola baju dan celana, mengoperasikan mesin jahit dan menyatukan pola-pola tersebut. Baju yang saya pakai sekarang dibuat melalui keterampilan jahit saya sendiri," sambung dia.

Peter Fremlin, Konsultan Disabilitas BWI, mengapresiasi capaian BWI tersebut. "Mereka kini sudah memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka bekerja secara mandiri. Mereka tidak akan mengandalkan belas kasih orang lain untuk melanjutkan kehidupan mereka," kata Peter. ❖

C. Perlindungan sosial untuk semua

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.





Program Perlindungan Sosial untuk Semua

Sekilas:

Sejalan dengan reformasi yang sedang dilakukan terhadap sistem jaminan sosial di Indonesia dan Inisiatif Landasan Perlindungan Sosial ILO, program perlindungan sosial ILO bertujuan membantu upaya pemerintah dan mitra sosial, yaitu organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program perlindungan sosial yang inklusif dan efisien. Pada 2014, ILO telah melakukan dua intervensi penting di bidang ini di Indonesia, yaitu: 1) Membantu upaya nasional melaksanakan mekanisme penyediaan perlindungan sosial dan layanan ketenagakerjaan yang lebih terpadu; dan 2) Bantuan teknis dalam menyusun skema pensiun publik baru yang diperkirakan akan dilaksanakan pada Juli 2015.

Untuk intervensi pertama, Proyek Layanan Satu Atap (LSA) ILO di Maluku dan Jawa Timur telah dikembangkan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Penilaian Berbasis Dialog Nasional tentang Perlindungan Sosial. Tujuannya adalah membantu penetapan mekanisme koordinasi yang lebih baik terhadap program-program perlindungan sosial. Didukung Pemerintah Jepang melalui Jaring Pengaman Sosialnya, proyek ini membantu upaya nasional yang dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Kesejahteraan Sosial untuk melaksanakan integrasi yang lebih baik terhadap program perlindungan sosial dan program bantuan ketenagakerjaan di tingkat nasional maupun lokal.

Intervensi kedua terkait dengan skema pensiun baru untuk pekerja di sektor swasta yang akan diperkenalkan pemerintah pada Juli 2015. Untuk merespons permintaan Kementerian Tenaga Kerja, ILO telah mengadakan penelitian aktuarial terhadap skema pensiun yang diusulkan tersebut dengan komponen peningkatan kapasitas untuk mendukung tim aktuarial BPJS Ketenagakerjaan

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

Proyek Layanan Satu Atap (LSA) ILO

1. **Pengesahan terhadap penelitian tentang rancangan Sistem Rujukan Terpadu untuk memperluas perlindungan sosial di Indonesia** oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan.
2. **Peluncuran penelitian tentang rancangan Sistem Rujukan Terpadu untuk memperluas perlindungan sosial di Indonesia** yang melibatkan partisipasi perwakilan dari sekitar 20 kabupaten/kotamadya, termasuk penyuluhan penelitian dalam kegiatan lokakarya yang diadakan Kementerian Sosial pada bulan November dan Desember.

3. **Inisiasi tim ad-hoc di bawah koordinasi Kementerian Sosial** untuk melaksanakan Sistem Rujukan Terpadu bekerja sama dengan UNICEF dan GIZ.
4. **Pengadopsian pendekatan Sistem Rujukan Terpadu oleh pemerintah sebagai salah satu strategi nasional untuk mengurangi kemiskinan** dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2015-2019) terutama Keputusan Presiden No. 43/2014 tanggal 17 Mei 2014 mengenai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015. Di antara tindakan khusus yang disebutkan dalam keputusan ini adalah pengembangan sistem rujukan terpadu yang diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan program-program perlindungan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan.

Program Bantuan Teknis Skema Pensiun Baru

1. **Pelaksanaan penelitian aktuarial** terhadap skema pensiun publik.
2. **Penyelesaian pelatihan aktuarial** selama 10 hari untuk tim aktuarial BPJS Ketenagakerjaan.
3. **Pemaparan hasil awal penelitian aktuarial** kepada konstituen ILO pada November 2014.



Memperluas perlindungan sosial di Indonesia melalui Sistem Rujukan Terpadu

Indonesia berupaya memperluas cakupan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Konstitusi Indonesia mengakui bahwa jaminan perlindungan sosial merupakan hak seluruh warganegara dan merupakan tanggung jawab negara dalam pengembangan sistem perlindungan sosial tersebut. Undang-Undang No. 24 Tahun

2011 mengenai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menegaskan perluasan cakupan jaminan sosial kepada seluruh penduduk Indonesia atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua dan kematian.

Untuk mendukung penerapan jaminan sosial untuk semua, ILO, bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, meluncurkan studi berjudul *"Rancangan Sistem Rujukan Terpadu untuk Perluasan Program Perlindungan Sosial di Indonesia"* pada Desember di Jakarta.

Sistem Rujukan Terpadu merupakan sistem pelayanan terpadu yang dilaksanakan pada struktur pemerintahan dengan sistem otonomi daerah, yang ditujukan untuk mendekatkan lokasi



pelayanan dan pemberian layanan sosial kepada masyarakat, memberdayakan lembaga masyarakat dan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan dan transfer, meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi, mendorong transparansi informasi program sosial, penelusuran melalui efisiensi sistem manajemen informasi dan penyelesaian pengaduan.

Melalui penyediaan kombinasi paket bantuan, Sistem ini akan mampu memaksimalkan dampak dari intervensi yang diberikan dalam mengurangi kemiskinan. SRT juga akan berkontribusi pada koordinasi pelaksanaan dari dua penyedia jaminan sosial yang baru – BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan - dan program bantuan sosial di Indonesia.

Karenanya, tujuan studi ini adalah penerapan Sistem Rujukan Terpadu di seluruh negeri. Laporan ini dikembangkan setelah studi kelayakan di tiga provinsi (Maluku, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT)) dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan dan melalui diskusi kelompok. Studi ini juga mengumpulkan mekanisme serupa yang sudah ada di sejumlah kabupaten di Indonesia, seperti Sragen, Jawa Tengah.

Studi ini juga memberikan ide dan panduan lanjutan terhadap rancangan dari satu atau lebih model Sistem Rujukan Terpadu yang dapat diadaptasi dan diterapkan di seluruh bagian Indonesia. Sistem Rujukan Terpadu akan menjadi mekanisme utama dalam memberikan akses terhadap manfaat dan layanan perlindungan sosial, dan akan mendukung BPJS 1 mengenai kesehatan dan 2 mengenai ketenagakerjaan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai upaya-upaya memperluas cakupan perlindungan sosial terhadap pekerja informal, pekerja mandiri, petani dan kelompok yang tidak tercakup. ❖

Mempromosikan Hak dan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas melalui Undang- Undang (PROPEL- Indonesia)



Sekilas:

ILO-PROPEL Indonesia bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam perlindungan kebijakan dan undang-undang terkait pekerjaan dan pelatihan untuk penyandang disabilitas agar kebijakan dan undang-undang tersebut konsisten dengan standar internasional. Proyek ini mendukung pemerintah dan para pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam pekerjaan dan pelatihan, melalui kerjasama dengan para mitra untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas. Didanai Irish Aid, Proyek PROPEL-Indonesia dimulai Juni 2012, sebagai bagian dari Proyek PROPEL global yang telah dilaksanakan di beberapa negara di kawasan Asia dan Afrika.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Bantuan teknis dan masukan kepada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penyandang disabilitas.** Selain itu, PROPEL juga mendukung partisipasi organisasi dari provinsi-provinsi sasaran guna berpartisipasi dalam diskusi mengenai RUU ini bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. **Bantuan teknis kepada Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengadakan bursa kerja inklusif.** Selain itu, sertifikasi partisipasi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas selama penyelenggaraan bursa kerja inklusif tersebut.

3. **Bantuan teknis untuk Kota Mojokerto dalam merancang**

dan mengkaji Undang-Undang Disabilitas mengenai Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas.

4. **Penerapan lokakarya konsultasi di empat universitas** (Semarang, Surabaya, Bandung dan Kupang) untuk memperkenalkan dan melihat kemungkinan **memasukkan isu disabilitas dalam kurikulum Fakultas Hukum.** Beasiswa pun diberikan kepada mahasiswa fakultas hukum yang mengadakan penelitian mengenai masalah hukum terkait pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

5. **Penguatan kapasitas pemangku kepentingan tentang disabilitas:** kementerian lini, serikat pekerja, organisasi pengusaha, universitas dan media massa. Untuk itu, dua pelatihan tentang Kesetaraan Disabilitas diadakan di Jakarta.

6. **Pelaksanaan Survei Awal di 16 Balai Latihan Kerja (BLK) di Jawa Timur** untuk mengetahui akses penyandang disabilitas terhadap pelatihan keterampilan.

7. **Pembentukan mekanisme penempatan kerja bagi penyandang disabilitas di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT)** untuk memfasilitasi akses pencari kerja dengan disabilitas, badan penyalur tenaga kerja dan perusahaan.

8. **Peningkatan kesadaran media tentang masalah disabilitas** diadakan bekerja sama dengan AJI Jakarta, AJI Kupang dan PWI Jawa Timur. Pelatihan untuk Pelatih diadakan bagi staf majalah DIFFA dan dua pelatihan media bagi perwakilan media diadakan di Surabaya, Jawa Timur dan di Kupang, NTT.

9. **Pengembangan Panduan Peliputan Media mengenai Disabilitas,** bekerja sama dengan majalah DIFFA dan Dewan Pers. Panduan ini diluncurkan pada Desember 2014.

10. **Pelaksanaan Survei Awal Media untuk mengetahui perspektif berbagai media** (TV, koran, majalah, radio, media online) selama 10 tahun terakhir, dalam meliput tentang disabilitas di Indonesia.

11. **Sosialisasi Video SAMA (video tentang disabilitas) ke badan-badan PBB dan pemangku kepentingan lain.** Untuk pertama kalinya, video-video ini diproduksi sendiri oleh penyandang disabilitas dan menampilkan dua hak penting penyandang disabilitas, yaitu hak atas pekerjaan layak dan fasilitas umum.

Target Tahun 2015:

- Mengadakan serangkaian lokakarya di tingkat nasional dan provinsi tentang proses kajian undang-undang tentang penyandang disabilitas. Ini mencakup peraturan lanjutan seperti peraturan gubernur.
- Mengadakan konsultasi dan lokakarya untuk fakultas hukum/universitas pilihan di tingkat nasional dan provinsi dengan bantuan Universitas Atma Jaya Jakarta.
- Memberi penghargaan kepada mahasiswa yang mengadakan penelitian tentang masalah hukum terkait pekerjaan penyandang disabilitas.
- Terus membantu konstituen terkait pelaksanaan mekanisme antara pencari kerja, laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas dengan badan penyalur tenaga kerja (pameran kerja, *platform* pintu masuk atau *gateway*, sistem referensi).
- Melanjutkan partisipasi media dalam persoalan yang menyangkut disabilitas dan pekerjaan.

Menuju Media yang Inklusif terhadap Disabilitas di Indonesia



Media memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi sikap dan persepsi publik mengenai disabilitas. Persepsi yang diciptakan media menginformasikan cara penyandang disabilitas

diperlakukan di masyarakat. Media, karenanya, bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas; memastikan bahwa hak-hak tersebut dipromosikan dan dilindungi; dan, secara tepat memberitakan bagaimana kehidupan penyandang disabilitas, apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam komunitasnya.

Untuk mendukung media Indonesia memperluas liputannya mengenai disabilitas, ILO bekerja sama dengan Dewan Pers meluncurkan Panduan Peliputan Disabilitas pada bulan Desember 2014 di Jakarta. Peluncuran ini diselenggarakan sejalan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.

Merupakan panduan pertama, Panduan ini disusun untuk menyediakan sumber informasi praktis bagi awak media profesional yang tertarik untuk meliput dan memberitakan persoalan-persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia. Panduan ini

merupakan sumber informasi 'satu atap' mengenai statistik disabilitas global, dan menyediakan panduan praktis mengenai terminologi yang tepat, tips pemberitaan, referensi standar nasional dan internasional utama dengan fokus khusus pada hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan.

Panduan ini pun menyediakan informasi kontak organisasi-organisasi yang menangani masalah disabilitas. Panduan ini ditujukan bagi para redaktur, wartawan, penyiar, produser, perancang program (*programme maker*) dan presenter. Buku panduan ini juga dapat digunakan oleh web editor, serta untuk membuat produk multimedia interaktif.

"Isu-isu disabilitas masih belum terliput oleh media kendati sebagian besar penduduk hidup dengan disabilitas. Panduan peliputan ini merupakan langkah awal menuju media yang inklusif di negara ini. Melalui panduan ini, saya berharap permasalahan disabilitas akan menjadi bagian dari peliputan dan pemberitaan yang dapat membantu menghapuskan segala bentuk hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, dari sikap, fisik, ekonomi dan budaya," kata Nezar Patria, anggota Dewan Pers yang juga mengambil bagian dalam penyusunan Panduan ini.

"Pemberitaan mengenai disabilitas dan khususnya hak-hak penyandang disabilitas mungkin tidak mudah, namun ini merupakan tanggung jawab yang penting. ILO yakin panduan peliputan ini akan dapat membantu jurnalis Indonesia membentuk pemahaman yang lebih baik tentang penyandang disabilitas, khususnya hambatan besar yang mereka hadapi dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan pekerjaan serta akses terhadap fasilitas umum," ujar Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia, mengomentari peluncuran Panduan ini.

Saat ini terdapat lebih dari 1 milyar orang dengan disabilitas di seluruh dunia atau 15 persen dari jumlah penduduk global. Sementara di Indonesia, diperkirakan 10 persen dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. ❖





Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (UNPRPD)

Sekilas:

Pada tahun 2011, enam badan PBB (ILO, WHO, UNDP, OHCHR, UNICEF dan UN DESA) membentuk Kemitraan PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNPRPD)—sebuah dana perwalian multi-donor (MDTF)—untuk mendukung kerjasama antara badan-badan PBB di tingkat negara guna mempromosikan hak dan peluang para penyandang disabilitas. Tujuan dari UNPRPD adalah mengembangkan kapasitas para pemangku kepentingan nasional, khususnya pemerintah dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas guna mendorong penerapan Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCPRD) dengan lebih efektif. Salah satu dari negara pelaksana pertama dari UNPRPD adalah Indonesia.

Kendati pemerintah Indonesia semakin menaruh perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya melalui ratifikasi UNCPRD pada November 2011, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran atas hak-hak penyandang disabilitas, serta memperkuat pondasi kelembagaan disabilitas. Oleh karena itu, proyek ini akan memfokuskan diri pada penciptaan lembaga yang berkemampuan dan inklusif, serta mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat pengumpulan data terkait dengan disabilitas. Di Indonesia, proyek ini dilaksanakan bersama-sama oleh ILO, WHO, UNESCO dan UNFPA, dan berakhir pada akhir Desember 2014.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Peningkatan kapasitas penyegaran mengenai UNCRPD bagi organisasi-organisasi penyandang disabilitas di Jakarta.** Ini termasuk pengenalan mengenai bagaimana menanggapi gambaran media mengenai masalah disabilitas.
2. **Kemitraan dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)** untuk merekrut pelatih internal dari PPDI guna mendukung peningkatan kapasitas mengenai UNCRPD, baik untuk pejabat pemerintah dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas.
3. **Serangkaian peningkatan kapasitas mengenai UNCRPD dan pengelolaan disabilitas di tempat kerja** bagi pejabat pemerintah di dinas ketenagakerjaan provinsi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
4. **Serangkaian pelatihan untuk organisasi-organisasi penyandang disabilitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jawa Timur dan NTT** mengenai pendidikan keuangan, keterampilan komunikasi, negosiasi dan presentasi serta manajemen proyek.
5. **Pembuatan dua video partisipatif mengenai disabilitas berjudul "SAMA: Ruang, Peluang dan Perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas", bekerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman.** Video ini merupakan

video partisipatif pertama yang dibuat dan diproduksi oleh penyandang disabilitas sendiri di Jakarta dengan menampilkan dua hak penting dari penyandang

disabilitas: hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas fasilitas umum. Menggunakan kata-kata, pilihan gambar mereka sendiri, video-video ini merekam keseharian, perjuangan, perjalanan dan harapan para penyandang disabilitas.





PROMOTE: Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga guna Menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak

Sekilas:

Pada Juni 2011, ILO mengadopsi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang akan memperluas, bagi negara-negara yang meratifikasinya, jangkauan perlindungan bagi jutaan pekerja, terutama perempuan dan anak-anak, yang hak-hak dasarnya belum terjamin. Melalui pengadopsian ini, Konferensi Perburuhan Internasional menegaskan: PRT, juga pekerja lainnya, berhak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak. Konvensi ini dengan jelas menegaskan bahwa anak-anak di atas usia minimum untuk bekerja harus diberi perlindungan khusus saat melakukan pekerjaan domestik. Proyek "PROMOTE" mempromosikan perwujudan Pekerjaan Layak untuk PRT sebagai upaya mengurangi pekerja rumah tangga anak (PRTA).

Proyek PROMOTE bertujuan untuk mengurangi PRTA secara signifikan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi-organisasi PRT agar dapat mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT secara efektif. Proyek ini berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian organisasi PRT untuk mengurangi PRTA serta mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT, dengan fokus utama pada Indonesia, sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia dan tempat tinggal bagi jutaan PRT dan PRTA. Efektivitas kegiatan di Indonesia tentunya akan berpengaruh dan berdampak besar pada pengembangan kebijakan di kawasan ini, terutama di ASEAN.

Pada Juli 2014, Nota Kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan Proyek PROMOTE telah ditandatangani oleh ILO Jakarta dan Kementerian Tenaga Kerja, dan Rencana Aksi/Rencana Kerja PROMOTE pun telah disetujui Komite Penasihat Proyek pada pertengahan September 2014.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Dukungan dari pemangku kepentingan lokal, khususnya dari provinsi-provinsi sasaran,** melalui sosialisasi Proyek kepada para pemangku kepentingan di provinsi-provinsi sasaran (DKI Jakarta, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan).
2. **Pengembangan metodologi yang lebih baik untuk memperkirakan jumlah PRT dan PRTA** menggunakan data dari survei yang ada (Sakernas dan Susenas). Angka perkiraan ini telah digunakan proyek ini untuk berbagai kegiatan, termasuk peningkatan kesadaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas.
3. **Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pekerjaan layak untuk PRT dan penghapusan PRTA melalui berbagai bentuk media dan media sosial.** Pelibatan media secara aktif dilakukan melalui program bincang-bincang dan iklan layanan masyarakat. Melalui media sosial, akun Facebook telah disukai lebih dari 7.100 facebookers dan akun Twitter mencapai 2.800 pengikut.
4. **Penyusunan Kode Etik Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) dengan dukungan dari ILO.** Kode Etik ini memberikan panduan kepada anggota-anggota APPSI mengenai penerapan usia minimum untuk bekerja (18 tahun ke atas) dalam perekrutan dan penempatan PRT

serta melindungi melalui kegiatan pemantauan pasca penempatan. Sanksi akan diberikan kepada anggota APPSI yang melanggar.

5. **Pelaksanaan survei Pengetahuan, Perilaku dan Sikap terhadap Perlindungan Hukum bagi PRT**, bekerjasama dengan Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia. Hasil survei ini akan digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pekerjaan layak bagi PRT dan penghapusan PRTA.
6. **Mobilisasi kaum muda untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT dan penghapusan PRTA menggunakan serangkaian video dan cerita foto**, bekerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman.
7. **Pengembangan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan akses informasi kepada PRT dan majikan**. Melalui sistem ini diharapkan sekitar 10.000 PRT akan dijangkau dan memperoleh informasi pendidikan terkait pekerjaan layak bagi PRT dan penghapusan PRTA.
8. **Pengembangan program aksi oleh mitra utama** (KAPPRT BM, JALA PRT dan JARAK). Program-program ini akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari ILO. Di samping itu, sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas para mitra, berbagai pelatihan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan tentang PRT dan PRTA, advokasi, mobilisasi dan

pengelolaan melalui ponsel telah dikembangkan.

9. Pelaksanaan Lokakarya Regional Serikat Pekerja tentang Peningkatan Kapasitas Organisasi PRT dan Penghapusan PRTA, dengan bantuan dari Biro Kegiatan Pekerja ILO (ACTRAV), pada Desember 2014. Sekitar 40 perwakilan serikat pekerja dan organisasi PRT dari Indonesia, China, Hongkong, India, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Kamboja, serta Filipina berpartisipasi dalam lokakarya ini dan mengembangkan rencana aksi untuk mengadvokasi kebijakan dan program aksi di setiap negara.
10. **Mendukung Federasi PRT Internasional untuk membuat jaringan komunikasi berbasis internet** antar organisasi PRT di kawasan Asia.



Kode Etik Baru mengenai PRT guna mencegah anak memasuki pekerjaan rumah tangga

Pekerja rumah tangga (PRT) masih merupakan jenis pekerjaan yang banyak diminati pekerja perempuan yang bekerja di negeri sendiri maupun di luar negeri. Kendati peran PRT sangat penting, pekerjaan rumah tangga masih belum diakui sebagai pekerjaan. Mengingat pekerjaan mereka dilakukan di lingkungan rumah pribadi, yang tidak dianggap sebagai tempat kerja di banyak negara, hubungan kerja mereka tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional atau peraturan lain, sehingga mereka tidak diakui sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan kerja.

Berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012, ILO memperkirakan jumlah PRT di Indonesia mencapai 2,6 juta. Selain PRT dewasa, salah satu bentuk pekerjaan anak yang paling umum di Indonesia adalah pekerja rumah tangga anak (PRTA). Meski demikian, pada 2009, diperkirakan jumlah anak-anak di bawah 15 tahun yang bekerja sebagai PRT mencapai sekitar 237.000 dan pada 2012, jumlah PRT usia 15 sampai 17 tahun di Indonesia berjumlah sekitar 111.000.

Karena PRT, seperti halnya pekerja lain, berhak atas kondisi kerja dan hidup yang layak dan mempekerjakan anak-anak sebagai PRT dilarang, maka Asosiasi



Kode Etik ini menegaskan pentingnya pemantauan pasca penempatan. Pemantauan akan dilakukan melalui kunjungan ke rumah, panggilan telepon dan kontak darurat, terutama selama tiga bulan pertama

Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) telah merumuskan Kode Etik mengenai Perlindungan PRT dan Penghapusan PRTA bagi para anggotanya pada 2014. Kode Etik ini dirumuskan dengan bantuan ILO

melalui Proyek Pekerjaan Layak bagi PRT guna Menghapus PRTA (PROMOTE).

Kode Etik ini mendesak semua anggota APPSI untuk bekerja sama dalam mencegah anak-anak di bawah umur bekerja sebagai PRT dan memastikan kondisi kerja yang layak melalui aktivitas pemantauan secara teratur pasca penempatan.

Berdasarkan peraturan pemerintah, Kode Etik ini mewajibkan semua anggota APPSI untuk tidak merekrut anak-

anak di bawah usia 18 tahun sebagai PRT. Kode Etik ini juga mendesak anggota APPSI untuk mengadakan advokasi tentang usia minimum bekerja kepada agen-agen penyalur mereka di daerah asal maupun di masyarakat.

Kode Etik ini menegaskan pentingnya pemantauan pasca penempatan. Pemantauan akan dilakukan melalui kunjungan ke rumah, panggilan telepon dan kontak darurat, terutama selama tiga bulan pertama. Kode Etik ini juga menyebutkan bahwa anggota APPSI perlu melakukan sosialisasi bagi calon PRT tentang kondisi kerja dan tunjangan yang menjadi hak mereka, misalnya jaminan sosial.

Kode Etik ini juga menerapkan sanksi terhadap anggota APPSI yang melakukan pelanggaran. ❖

Target Tahun 2015:

- Mengadakan pelatihan komprehensif untuk mengurangi PRTA dan mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT bagi para pemangku kepentingan.
- Membantu pengembangan dan pelaksanaan rencana advokasi nasional dan lokal untuk menghapus PRTA dan melindungi PRT.
- Melakukan kajian tentang risiko kesehatan dan keselamatan terkait pekerjaan rumah tangga.
- Bekerja sama dengan organisasi PRT, mendirikan pusat kegiatan PRT (dewasa dan anak-anak) di empat provinsi.
- Bekerja sama dengan konstituen ILO dan organisasi PRT, mengadakan pelatihan keterampilan untuk PRT.
- Meningkatkan layanan hotline.
- Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum pelatihan polisi tentang kerangka hukum yang terkait dengan penghapusan PRTA dan eksploitasi PRT, termasuk pengelolaan kasus gender dan anak-anak serta teknik investigasi.
- Membuat jaringan informal untuk penyedia layanan sosial di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Mengadakan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat dan peringatan hari-hari penting, termasuk Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia, Hari PRT Nasional, Hari Anak Nasional, Hari Perempuan Nasional dan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia.
- Mengembangkan dan memprakarsai sistem layanan untuk membantu pemulangan PRTA, dan membangun komitmen para penyedia layanan.
- Menjalin kemitraan inovatif dengan dunia usaha dan masyarakat madani guna mengurangi prevalensi pekerja anak dan meningkatkan pekerjaan layak bagi PRT di Indonesia.



https://twitter.com/bukan_PEMBANTU



<https://www.facebook.com/BukanPembantu>



Program Pekerja Anak

Sekilas:

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada 2002 melalui Keputusan Presiden No. 59/2002. Indonesia saat ini berada di tengah-tengah Rencana Aksi Nasional 20 tahun. Selama 10 tahun terakhir, pemerintah dan LSM telah berkolaborasi untuk menghapus pekerja anak di Indonesia.

Pada tahun 2012, ILO melaksanakan sebuah proyek global untuk mengentaskan pekerja anak melalui pendidikan yang bertujuan memperkuat keterkaitan di tingkat kebijakan antara bidang pekerja anak dan pendidikan, yang mengarah pada tindakan yang akan meningkatkan kesempatan bagi pekerja anak ataupun yang rentan menjadi pekerja anak untuk mendapatkan manfaat dari pendidikan. Didanai Kementerian Luar Negeri Pemerintah Belanda, proyek ini dilakukan di empat negara dan salah satunya adalah Indonesia. Dijalankan pada September 2011, proyek ini diterapkan di tiga lokasi: Jakarta dan sekitarnya, Sukabumi dan Makassar hingga akhir tahun 2014.

Selanjutnya, pada 2013 ILO juga memperoleh dukungan dari Aksi Global mengenai Pekerja Anak yang dijalankan di 41 negara dan Indonesia merupakan salah satu negara sasaran dari program tersebut. Proyek ini didanai Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Pada akhir 2013, ILO mengembangkan sebuah proyek baru yang tefokus pada Pelatihan Keterampilan bagi Anak-anak yang Lebih Besar selama 15 bulan, yang dibangun berdasarkan kegiatan-kegiatan dari proyek pekerja anak dan pendidikan yang sedang berjalan. Hasilnya adalah pengembangan dan pelaksanaan proyek "Memerangi pekerja anak melalui pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang mencapai usia minimum bekerja di daerah perdesaan" pada Juli 2014. Proyek ini mendukung anak-anak putus sekolah yang terlibat atau rentan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pelatihan keterampilan kejuruan kerap kali mendorong kecakapan literasi dan numerik, begitu pula dengan pelatihan kecakapan hidup yang lebih luas lagi, dengan tujuan memberikan peluang bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

Proyek ILO mengenai Memerangi Pekerja Anak melalui Pendidikan

1. **Peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi 100 anak jalanan di empat pusat pendidikan komunitas di Jakarta** dengan menyediakan pelatihan untuk 30 pembimbing dan 60 pekerja sosial mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan serta pendidikan kecakapan hidup menggunakan modul 3R-ILO pelatihan (hak, tanggung jawab dan keterwakilan). Peningkatan kualitas ini dilakukan melalui kerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI).



2. **Pelatihan keterampilan kejuruan bagi anak-anak jalanan yang lebih tua untuk membekali mereka dengan keterampilan yang lebih baik,** bekerja sama dengan Kementerian Sosial di bawah Skema Perlindungan Sosial untuk Kesejahteraan anak (Program Kesejahteraan Sosial Anak/PKSA).

3. **Program pelatihan keterampilan kejuruan tingkat menengah bagi 40 pemulung anak di tempat pembuangan sampah Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.** Fokus program ini adalah pelatihan otomotif dan menjahit, program magang serta pelatihan dasar keterampilan kewiraswastaan dilakukan dengan kolaborasi bersama Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Atas kesuksesan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi

Selatan mengalokasikan dana untuk pelatihan bagi 50 pekerja anak lainnya.

4. **Peningkatan keterampilan pribadi dan sosial terhadap 750 anak di 11 sekolah satu atap melalui program pra-kejuruan di Kabupaten Sukabumi.** Program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

5. **Komitmen Regional dalam menentang pekerja anak melalui lokakarya kerjasama Selatan-Selatan di Jakarta,** bersama dengan lima negara tetangga (Kamboja, Laos, Filipina, Vietnam dan Timor-Leste). Kerjasama tersebut mengidentifikasi kemajuan yang terjadi serta tantangan yang dihadapi untuk memastikan

percepatan aksi pengentasan pekerja anak di tingkat regional.

6. **Penyusunan dan adopsi panduan mengenai Pengarusutamaan Pekerja Anak dalam Perencanaan dan Program Sektor Pendidikan.** Panduan ini diujicoba di Provinsi Jawa Barat melalui kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan Save the Children.

7. **Penerapan kampanye mengenai pekerja rumah tangga anak melalui pertunjukan teater oleh para pekerja rumah tangga anak berjudul "Mutiara Retak Dibalik Kain Pel" di Jakarta.** Pertunjukan tersebut diselenggarakan sejalan dengan peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni dengan tema "Katakan Tidak

Proyek ILO mengenai Memerangi Pekerja Anak melalui Pelatihan Keterampilan bagi Anak-anak yang Mencapai Usia Minimum Bekerja di Daerah Perdesaan

pada Pekerja Anak dalam Pekerjaan Rumah Tangga.”

8. **Penerbitan dan peluncuran publikasi pekerja anak ILO berjudul, “20 Tahun Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia”.** Publikasi ini memperlihatkan aktivitas dan aksi yang dilakukan ILO dan para mitranya untuk mengatasi masalah pekerja anak di Indonesia sejak tahun 1992. Publikasi tersebut juga mendokumentasikan inisiatif yang diambil, kemajuan yang terjadi, komitmen yang dibuat, tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk untuk maju dan memastikan masa depan tanpa pekerja anak di Indonesia.
9. **Penyelesaian sejumlah penelitian mengenai pekerja anak,** antara lain: 1) *Analisa Makro dan Kajian Cepat Situasional mengenai Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia: Studi Kasus Jakarta dan Wilayah Sekitar* (dilaksanakan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA UI); 2) *Ulasan mengenai Mekanisme dan Pelaksanaan Praktik Hukum pada Kasus-kasus terkait Pekerja Anak dan Kerja Paksa di Indonesia* (dilaksanakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PHSKI)); dan 3) *Survei untuk Memperkirakan Eksploitasi Seks Komersial pada Anak (CSEC) di Wilayah Bekasi, Jawa Barat.*

1. **Dukungan terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk memberikan program pra-kejuruan untuk keseluruhan 300 anak-anak di sepuluh sekolah satu atap terpilih.** Universitas Pendidikan Indonesia juga akan terlibat dalam program untuk memperkuat pelatihan guru, pengembangan modul dan mengkaji keefektifan program dalam mencegah anak-anak putus sekolah dan menjadi pekerja anak.
2. **Dukungan terhadap Pemerintah Indonesia dalam penyusunan Peta Jalan Pekerja Anak** guna mempercepat penghapusan pekerja anak di Indonesia pada tahun 2022.
3. **Penyelenggaraan program-program penanggulangan**

pekerja anak di tempat pembuangan sampah, bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Makassar, Sulawesi Selatan.

4. **Pelaksanaan pelatihan kejuruan bagi keseluruhan 50 pekerja rumah tangga anak usia 15 – 17 tahun** di Bekasi dan Tangerang, bekerja sama dengan Yayasan Mitra Imadei.
5. **Penerapan kampanye pekerja anak nasional mengenai pekerja anak dan perlindungan sosial** sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan ILO dan para mitranya dalam memperingati Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia 2014 dan menegaskan upaya nasional memerangi pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya.



Target Tahun 2015:

- Bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, menyelenggarakan replikasi model pelatihan Pusat Pelatihan Internasional ILO (ITC) Turin untuk meningkatkan kapasitas penyedia pelatihan keterampilan mengenai Pelatihan Keterampilan dan Mata Pencarian: Panduan bagi para mitra proyek pekerja anak di daerah Jakarta dan Jawa Timur.
- Melibatkan serikat pekerja dalam pelatihan dan peningkatan kesadaran, bekerja sama dengan konfederasi serikat pekerja nasional (KSBSI, KSPI and KSPSI) untuk mendidik dan secara aktif melibatkan anggota mereka.
- Mengadakan program pelatihan bagi 150 anak-anak putus sekolah berusia 15 – 17 tahun, dengan memberikan mereka keterampilan yang sesuai dengan peluang pasar kerja di daerah Kabupaten Malang, Pasuruan dan Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Program pelatihan keterampilan ini merupakan bagian dari Balai Latihan Kerja (BLK) yang diselenggarakan bersama dengan LPKP (sebuah LSM lokal).
- Melakukan seleksi terhadap 60 anak-anak putus sekolah yang sudah mengikuti pelatihan keterampilan dan mata pencarian untuk mengikuti program pemagangan satu bulan di industri kecil dan menengah dan membimbing mereka mempersiapkan proposal usaha.
- Memberikan pelatihan kerja bagi anak-anak usia 15 – 17 tahun untuk mempersiapkan anak-anak putus sekolah dan pekerja anak dengan keterampilan yang diperlukan di daerah Kabupaten Blitar dan Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Program pelatihan keterampilan ini dipadukan antara pelatihan BLK dan pelatihan berbasis komunitas dengan 120 anak-anak sasaran. Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan PARAMITRA (sebuah LSM lokal).
- Menyelenggarakan Lokakarya Penegakan Hukum untuk para pemangku kepentingan kunci yang menangani masalah pekerja anak guna memperkuat peran mereka dalam memastikan pelaksanaan peraturan perundangan yang ada dan memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pekerja Anak dalam meraih target pemerintah terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada 2022.

Menginspirasi siswa

Para pelajar sekolah SMP satu atap di Sukabumi menunjukkan perkembangan pesat dalam keterampilan pribadi, sosial dan kecakapan hidup setelah diajarkan menggunakan modul pengajaran pra-vokasional yang baru, demikian penjabaran hasil terbaru *post-test* mengenai program intervensi pra-vokasional yang diselenggarakan di Kabupaten Sukabumi saat Lokakarya Berbagi Pengetahuan pada April lalu.

Lokakarya ini diselenggarakan ILO melalui Program Memerangi Pekerja Anak melalui Pendidikan, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Sukabumi dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Lokakarya ini menandai akhir dari tahap pertama Program Pekerja Anak ILO di Kabupaten Sukabumi dan daerah sasaran lain (Jakarta dan sekitarnya serta Makassar). Didanai Kementerian Luar Negeri Belanda, Proyek ini bertujuan memperkuat keterkaitan di tingkat kebijakan antara permasalahan pekerja anak dan pendidikan, yang mengarah pada tindakan yang dapat memperluas kesempatan bagi pekerja anak atau anak yang rentan terhadap pendidikan. Tahap selanjutnya dari program ini akan difokuskan pada pelatihan keterampilan dan mata pencaharian.

Penelitian *post-test* ini merupakan tindak lanjut dari penelitian *pre-test*,

melalui modul pengajaran pra-vokasional yang interaktif

yang bertujuan mengukur perubahan dalam keterampilan pribadi, sosial dan keterampilan hidup dari 371 pelajar yang berasal dari sembilan SMP satu atap dan tiga program pra-vokasional setelah mengikuti program intervensi menggunakan modul dan struktur pengajaran pra-vokasional yang baru.

“Modul dan struktur pengajaran pra-vokasional yang digunakan dalam program intervensi ini bersifat lebih partisipatif dan interaktif. Para guru secara interaktif melibatkan partisipasi siswa melalui simulasi dan kegiatan pra-vokasional praktis seperti pembuatan kerajinan tangan,” kata Fasrul, Staf Proyek ILO untuk Pekerja Anak dan Pendidikan.

lebih menyadari pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka di masa mendatang. Sebagian besar siswa bahkan menyatakan menolak pernikahan dini,” kata Anne.

Lokakarya ini diakhiri dengan penyerahan hasil penelitian kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta



Penelitian *post-test* ini memperlihatkan bahwa perubahan terbesar ditemukan dalam keterampilan pribadi (perilaku dan komunikasi), diikuti kecakapan hidup (pola pikir dan sikap) dan keterampilan sosial (kerja sama tim). Penelitian ini juga memperlihatkan dampak besar terhadap peningkatan keterampilan pribadi. Hasil temuan ini juga memperlihatkan keberhasilan intervensi baru ini dalam mencegah siswa agar tidak putus sekolah dan tetap bersekolah.



Modul-modul ini dikembangkan oleh UPI dengan menggunakan dan memadukan berbagai modul, termasuk modul-modul ILO seperti SCREAM – Mendukung Hak Anak melalui Pendidikan, Seni dan Media.

Sementara, Dr. Anne Hafina, Kepala Tim Peneliti UPI, mengatakan bahwa para siswa juga ditemukan menjadi lebih percaya diri, termotivasi dan komunikatif. “Apa yang mereka pelajari di sekolah juga mencerminkan kepribadian mereka. Mereka lebih menghormati teman dan



Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai rekomendasi dalam menyusun rencana pendidikan di masa mendatang di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Di samping itu, para peserta dari kabupaten lain, seperti Garut dan Tasikmalaya, yang memiliki kondisi serupa seperti Sukabumi tertarik untuk mereplikasi modul pengajaran pra-vokasional baru ini agar dapat mencegah putus sekolah dan mendorong lebih banyak siswa tetap bersekolah. ❖

HIV and AIDS Workplace Programme



Sekilas:

Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja yang diadopsi Juni 2010 mengakui pentingnya peranan yang dimainkan perusahaan dalam membatasi penularan dan dampak epidemik HIV. Kantor ILO di Indonesia telah memobilisasi konstituen tripartit untuk menetapkan kebijakan perusahaan tentang HIV dan AIDS yang difokuskan pada tiga hasil berikut: 1) menghapus diskriminasi kerja terhadap orang yang hidup dengan HIV (ODHA); 2) melakukan upaya pencegahan dan tes HIV secara sukarela yang dikaitkan dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja (K3) formal dan informal; serta 3) memastikan akses ke layanan, pengobatan dan bantuan bagi pasien HIV melalui tempat kerja.

Program ILO ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang HIV dan AIDS, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68 Tahun 2004, dan Rencana Strategis Nasional tentang HIV dan AIDS 2010-2014.

Didukung oleh:



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

Capaian Tahun 2014:

1. **Dukungan terhadap koordinasi Satuan Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-1)** untuk memastikan bahwa ODHA dan kelompok rentan lainnya diberi akses atas layanan kesehatan secara universal.

2. **Penyelesaian penelitian tentang Identitas Gender dan Orientasi Seksual: Mempromosikan Hak, Keragaman dan Kesenjangan di Dunia Kerja (PRIDE).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan kebijakan secara luas serta bentuk diskriminasi di tempat kerja yang dihadapi pekerja lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia.

3. **Mempromosikan informasi, konseling dan tes HIV di tempat kerja sebagai bagian dari** inisiatif VCT@Work. Inisiatif ini telah berhasil menjangkau lebih dari 150.000 pekerja yang

berpartisipasi dalam kegiatan Konseling dan Tes HIV secara Sukarela pada 2014.

4. **Penyelesaian pemetaan koridor ekonomi** yang menganalisis implikasi pembangunan ekonomi, di samping koridor ekonomi yang direncanakan sebagai upaya pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV secara nasional.

5. **Kemitraan dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia untuk memobilisasi sektor swasta dalam menyediakan layanan Pencegahan, Pengobatan dan Perawatan HIV** di daerah-daerah dengan tingkat prevalensi yang tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat.



Target Tahun 2015:

- Melanjutkan dukungan terhadap kelompok kerja pemerintah dan masyarakat madani dalam mengatasi tantangan dalam mengakses layanan perlindungan sosial di tingkat lokal dan melakukan perbaikan.
- Mengadakan peningkatan kapasitas bagi konstituen tripartit tentang pelaksanaan program HIV dan AIDS di tempat kerja.
- Menyebarkan hasil inisiatif VCT@Work saat Kongres AIDS Nasional ke-5 yang akan diselenggarakan di Makassar.
- Mengembangkan model yang murah untuk menyediakan layanan bantuan pencegahan, konseling dan perawatan HIV secara efektif melalui sektor swasta.

Memperkuat partisipasi sektor swasta dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja

Perwakilan organisasi masyarakat berkumpul di Jakarta, dari 29-31 Agustus, untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dalam mengatasi tantangan menjangkau pekerja laki-laki berisiko tinggi di tempat kerja. Lokakarya dua hari bertema “Metode Program Partisipasi Sektor Swasta untuk Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja” ini diselenggarakan ILO melalui program Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja (VCT@Work).“

Diluncurkan pada 2013, inisiatif VCT@Work di Indonesia ini membantu 350.000 pekerja untuk memperoleh layanan VCT pada akhir tahun 2015, dari yang ditargetkan sebanyak 10.000 orang pekerja di akhir tahun 2013. Prioritasnya adalah sektor industri dengan tingkat kerentanan HIV yang sudah terbukti, termasuk sektor transportasi, perkebunan, pertambangan dan konstruksi.

Hingga saat ini, melalui kerja sama erat antara ILO dengan berbagai organisasi masyarakat, inisiatif VCT@WORK di Indonesia ini telah menjangkau lebih dari 29.000 pekerja dengan VCT dan telah membawa mereka yang teruji positif untuk memperoleh perawatan. Mitra utamanya antara lain adalah Yayasan Kusuma Buana (YKB), Lembaga Advokasi HIV dan AIDS Sulawesi Tenggara, Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan

Adiksi dan Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Sebagai bagian dari upaya mencapai target inisiatif, lokakarya ini bertujuan meningkatkan kapasitas petugas lapangan serta anggota masyarakat dari organisasi masyarakat terkait di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk secara aktif melibatkan sektor swasta dalam program-program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Partisipasi sektor swasta untuk mengatasi epidemik HIV dapat meningkatkan secara signifikan efektivitas advokasi dan kebijakan perlindungan hak-hak pekerja yang berisiko terjangkit atau sudah positif mengidap HIV.

Selama lokakarya ini, Dr. Sudi Astono, MS, Kepala Seksi Pengawasan Norma Pelayanan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, mengingatkan peserta tentang prinsip utama Keputusan Menteri No. 68/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja, seraya menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi sarana penting untuk memobilisir sektor swasta. Sementara itu, Dr. Adi Sasongko, Direktur Layanan Kesehatan YKB menegaskan bahwa strategi untuk melibatkan partisipasi sektor swasta adalah salah satu intervensi paling strategis untuk

Tingkat pertumbuhan epidemik HIV di Indonesia adalah salah satu yang tercepat di Asia. Sekitar 70,4 persen orang yang hidup dengan HIV (ODHA) di Indonesia berada dalam usia produktif mereka, yaitu antara 25 hingga 49 tahun. Tempat kerja merupakan tempat di mana mereka yang terinfeksi epidemik ini meluangkan sebagian besar waktu mereka.

meningkatkan kesadaran tentang perilaku seks, pemakaian kondom, dan risiko HIV dan AIDS.

Lokakarya ini diakhiri dengan penyusunan rencana aksi tindak lanjut untuk memperkuat partisipasi sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Peserta juga menyusun peta perusahaan prospektif di daerah mereka masing-masing. ❖



Aksi Tripartit untuk Melindungi dan Mempromosikan Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek ASEAN Triangle)

Sekilas:

Selama beberapa tahun terakhir, volume dan kompleksitas perpindahan pekerja dari dan di dalam kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan. Tren ini disebabkan beberapa faktor, seperti perubahan demografis, kesenjangan penghasilan, masalah keamanan, jaringan migran yang dibentuk serta transportasi yang lebih baik. Kendati pekerja migran memberi kontribusi besar untuk negara asal maupun tujuan, banyak di antara mereka—terutama yang berstatus tidak tetap—masih menghadapi masalah pelanggaran hak asasi manusia dan hak mereka sebagai pekerja.

Tidak ada pendekatan unilateral yang efektif terkait tata kelola migrasi pekerja. Beberapa tindakan yang diambil di negara asal memiliki konsekuensi besar di negara tujuan dan demikian pula sebaliknya. Di samping itu, ada kesamaan tantangan yang dihadapi pekerja migran perempuan dan laki-laki, penyedia layanan serta pemerintah di kawasan ini.

Proyek Triangle yang didanai Departemen Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan Kanada ini bertujuan mengurangi secara signifikan eksploitasi terhadap pekerja migran di kawasan ini melalui peningkatan perlindungan hukum dan migrasi yang aman serta peningkatan perlindungan bagi para pekerja. Proyek ini mempromosikan pendekatan bilateral dan regional untuk mengatasi masalah bersama, membuat regionalisme menjadi lebih efektif, serta meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di ASEAN. Tujuan proyek ini adalah sesuai dengan prioritas strategis Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN (2010-2015).

Didukung oleh:

Canada 

Capaian Tahun 2014:

1. **Seminar Tripartit Menuju Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 mengenai Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT).** Seminar satu hari ini dibuka secara resmi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia saat itu, H. Muhaimin Iskandar, dan dihadiri oleh perwakilan Tripartit dan LSM Indonesia, sebagai forum di mana pemangku kepentingan terkait di Indonesia dapat membahas isi Konvensi ILO No. 189, mempelajari pengalaman dari negara tetangga di ASEAN, Filipina, serta membahas kemungkinan dan tantangan yang dihadapi untuk meratifikasi konvensi ini.

2. **Peluncuran Pangkalan Data Statistik Migrasi Pekerja Internasional (ILMS) untuk ASEAN,** terdiri dari data statistik tentang migrasi pekerja dari negara-negara ASEAN termasuk dari Indonesia. Pangkalan data ILMS ini ada di ILOSTAT, yaitu portal terkemuka di dunia untuk

data statistik mengenai pasar kerja, sebagai sumber informasi yang unik, disediakan secara gratis untuk para pengguna online - www.ilo.org/ilostat - dalam 'Databases by subject', 'Special collections', 'International Labour Migration' - http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject?_adf.ctrl-state=qsaro0yjq_754&_afLoop=1096035999106465

3. **Perwakilan Tripartit dan LSM Indonesia dalam Forum Migrasi Pekerja ASEAN ke- 7 (AFML ke-7) di Nay Pyi Taw, Myanmar.** AFML adalah pertemuan tahunan yang mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta organisasi masyarakat madani di negara-negara anggota ASEAN untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan ASEAN. Untuk tahun 2014, tema yang dipilih adalah "Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dengan Tindakan yang Lebih Baik untuk Melindungi dan Mempromosikan

Hak-hak Pekerja Migran", dengan sub-tema: "Promosi perlindungan yang adil dan tepat, pembayaran upah, dan akses yang memadai atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak bagi pekerja migran; dan Koordinasi peran pemangku kepentingan utama untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk memfasilitasi aspek-aspek migrasi pekerja, termasuk rekrutmen, persiapan, perlindungan di luar negeri, dan pengembalian serta reintegrasi.



Target Tahun 2015:

- Pertemuan Regional ASEAN Kedua tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia.
- Partisipasi perwakilan Konsituten Tripartit dan LSM Indonesia dalam Forum ASEAN 2015 mengenai Pekerja Migran (AFML) yang dijadwalkan di Kuala Lumpur, Malaysia.
- Seminar Eksekutif Senior tentang Migrasi Pekerja. Seminar ini diselenggarakan ILO/ITC, COMPAS di Universitas Oxford, bagi pegawai senior pemerintah mengenai migrasi pekerja, yang dijadwalkan diselenggarakan di Indonesia.

Mempromosikan migrasi pekerja terampil lintas batas di kawasan ASEAN

Upaya untuk memperkuat pengakuan atas keahlian pekerja lintas batas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibahas oleh perwakilan tingkat tinggi negara-negara anggota ASEAN di Jakarta yang diselenggarakan pada 24- 25 September.

Pertemuan dua hari ini membahas tentang pengakuan bersama atas keahlian pekerja, setelah AEC diberlakukan pada tahun 2015, serta mengembangkan sejumlah rencana aksi melalui diskusi antara pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha.

Abdul Wahab Bangkono, Sekretaris Jenderal, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, menegaskan perlunya harmonisasi standar kompetensi antar negara anggota ASEAN. "Kita perlu menyelaraskan standar kompetensi kita serta mencari model yang dapat digunakan oleh kita semua. Karenanya, saya sangat menghargai pertemuan ini karena kita perlu mempromosikan pengakuan bersama atas keahlian (pekerja)," katanya, seraya menambahkan bahwa sebagian besar standar kompetensi Indonesia mengacu pada standar yang berlaku di Australia dan Selandia Baru.

"Pengakuan bersama mengenai keahlian ini merupakan perangkat utama dalam mobilisasi pekerja ahli dan terampil

terkait keahlian teknis/vokasional di ASEAN. ILO, sebagai pelaku utama dalam permasalahan dunia kerja, akan tetap berkomitmen memberikan dukungan teknis guna memastikan terwujudnya pekerjaan yang layak dalam tujuan MEA 2015," ujar Carmela Torres, Spesialis Senior ILO mengenai Keterampilan dan Kemampuan Kerja.

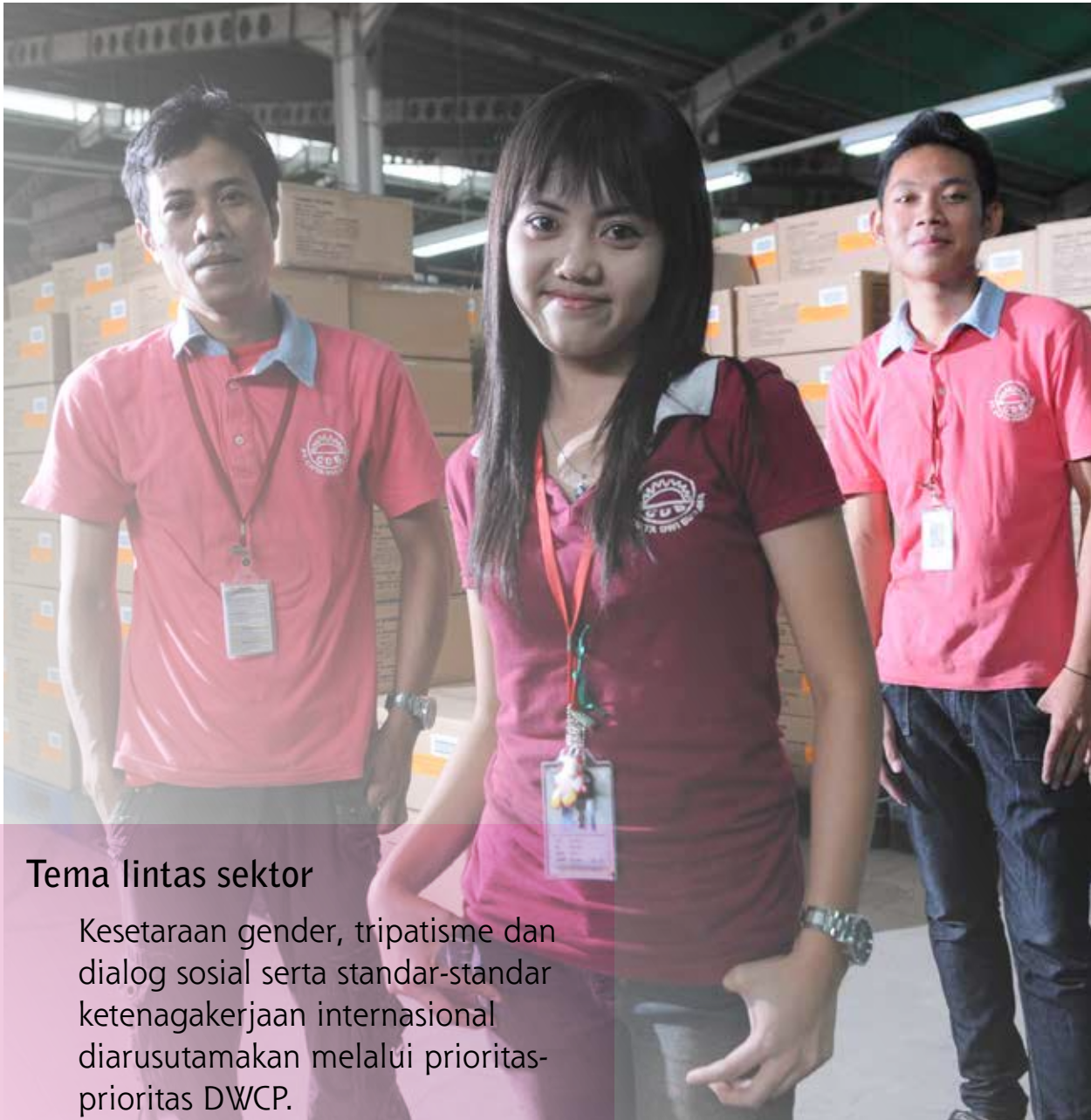


Dihadiri perwakilan dari pemerintah ASEAN, organisasi pekerja dan organisasi, lokakarya ini memainkan peran penting dalam membantu negara-negara anggota ASEAN membuat pengakuan bersama atas keahlian pekerja. Acara ini diselenggarakan oleh Program Keterampilan Regional ILO, yaitu proyek ILO yang bertujuan untuk meningkatkan migrasi kerja di kawasan ASEAN (ASEAN TRIANGLE), Kantor ILO untuk Indonesia, dan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Acara ini didukung oleh Pemerintah Kanada dan Program Kemitraan ILO/ Korea.

"Kami berharap dapat mengurangi eksploitasi terhadap pekerja migran di kawasan ini melalui peningkatan migrasi yang legal dan aman serta pengakuan bersama mengenai keahlian sebagai bagian dari pengembangan perangkat perlindungan hak," kata Manuel Imson, Staf Senior/Koordinator Proyek ASEAN TRIANGLE.

Dalam hal pengakuan keahlian bersama ini, ILO telah memberikan bantuan teknis dan layanan dalam berbagai bentuk. Bantuan ini mencakup pengembangan Model Standar Kompetensi Regional yang telah dipergunakan sebagai acuan dari pengembangan standar keterampilan dan keahlian nasional di kawasan ini, serta kegiatan mendorong mekanisme pengakuan bersama mengenai keahlian ini di Negara-negara sub-regional Mekong dan sekitarnya (the Greater Mekong Sub-regional/GMS). Di samping itu, hasil "Kajian Kesiapan Negara-negara anggota ASEAN dalam Pelaksanaan Komitmen Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil dalam MEA pada 2015" telah dipublikasikan.

Sekretariat ASEAN secara aktif terlibat dalam rapat-rapat konsultasi dan memainkan peran penting dalam mengembangkan Kerangka Kerja Kualifikasi Regional ASEAN (AQRF). ❖



Tema lintas sektor

Kesetaraan gender, tripatisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diarusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP.



MAMPU – Akses atas Pekerjaan dan Pekerjaan Layak bagi Perempuan

Sekilas:

Proyek ILO-MAMPU berupaya menyediakan pekerjaan layak bagi perempuan yang terbelang rentan di pasar kerja, terutama perempuan yang terlibat dalam pekerjaan rumahan, termasuk penyandang disabilitas. Ini merupakan bagian dari Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) yang dipelopori Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di Indonesia.

Pekerja rumahan, di Indonesia kerap dianggap sebagai pekerja yang “berada di luar sistem kerja” (*putting-out system*), merupakan pekerja yang bekerja di rumah atau lokasi lain di luar tempat kerja pengusaha untuk memperoleh upah dengan membuat produk yang ditentukan pengusaha. Karena mereka bekerja secara terisolir dengan pengaturan kerja secara informal, posisi mereka kurang diakui, tidak terwakili dan tidak memiliki suara, serta memiliki kekuatan berunding yang lemah kendati mereka harus bekerja selama berjam-jam untuk memperoleh upah kecil, bahkan biasanya dalam kondisi yang tidak aman dan kurang sehat serta rentan dieksploitasi

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

Mengidentifikasi dan memberdayakan pekerja rumahan perempuan

1. **Sekitar 1.540 pekerja rumahan telah diidentifikasi dan diberi pelatihan** (yang terdiri dari 1.453 perempuan dan 87 laki-laki) **dan 33 kelompok pekerja rumahan telah dibentuk** di 13 kabupaten di empat provinsi (Sumatera Utara, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur) oleh mitra organisasi masyarakat madani proyek ini. Topik pelatihan mencakup advokasi, pengorganisasian, kesadaran hukum, kepemimpinan, gender, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pendidikan keuangan.

2. **Pengumpulan data awal tentang pekerja rumahan perempuan yang ditargetkan.**

3. **Jangkauan terhadap pekerja rumahan yang diprakarsai mitra serikat pekerja di sektor mereka.** Serikat pekerja yang berpartisipasi adalah FSB Kamiparho-KSBSI, FSB Garteks-KSBSI, FSP RTMM-KSPSI Rekonsiliasi, FSP TSK-KSPSI Rekonsiliasi, FSP TSK-KSPSI Kongres Jakarta, dan KSPI.

Peningkatan kesadaran mengenai pekerjaan rumahan

1. **Penyusunan dan penerbitan publikasi mengenai Konvensi dan Rekomendasi ILO tentang Pekerjaan Rumahan** dalam bahasa Inggris dan Indonesia: Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996 tentang Pekerja Rumahan/Rekomendasi

ILO No. 184 Tahun 1996 tentang Pekerjaan Rumahan.

2. **Peningkatan kesadaran mengenai pekerja rumahan** di kalangan pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan lembaga masyarakat madani yang mendukung pekerja rumahan melalui lokakarya di tingkat nasional maupun provinsi (Jawa Timur dan Sumatera Utara).

3. **Pengembangan dan penyebaran materi kampanye mengenai pekerjaan layak untuk pekerja rumahan** dalam bentuk poster, kartu pos, ringkasan proyek, baju, topi, gelang, tas, buku cerita dan cerita bergambar kepada para konstituen tripartit, mitra proyek dan pemangku kepentingan lain selama lokakarya dan kegiatan umum.

Target Tahun 2015:

- Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pekerja rumahan, pemimpin pekerja rumahan dan kelompok mereka untuk memperbaiki kondisi kerja serta melakukan advokasi terhadap hak-hak mereka.
- Mendokumentasikan praktik dan pelajaran terbaik mengenai mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumahan dari kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di provinsi-provinsi sasaran untuk selanjutnya disebarluaskan.
- Berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pekerja rumahan di Indonesia melalui kegiatan peningkatan kesadaran, penelitian dan penyebaran praktik-praktik terbaik dan kisah perubahan.
- Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kapasitas mengenai pekerja rumahan di kalangan pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha dan pemangku kepentingan terkait lainnya di tingkat lokal maupun nasional guna membentuk pondasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada.
- Memperkuat kapasitas serikat pekerja untuk membantu akses pekerja rumahan atas pekerjaan yang layak.
- Memperkuat kapasitas pengusaha dan organisasi mereka untuk merancang dan memprakarsai inisiatif mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumahan dan penyandang disabilitas perempuan.
- Mengesahkan dan mengujicoba pelatihan tentang fasilitas pengasuhan anak berbasis masyarakat.
- Menyelesaikan materi K3 untuk pekerja rumahan.
- Menyediakan data berdasarkan bukti mengenai pekerja rumahan untuk advokasi kebijakan dan pengembangan program (survei BPS, penelitian pemetaan, penelitian Apindo, penelitian IKEA dan sebagainya).

Capaian Tahun 2014 (cont):

Memperkuat kapasitas pemangku kepentingan utama untuk membantu pekerja rumahan perempuan dan penyandang disabilitas perempuan yang melakukan pekerjaan rumahan untuk memperoleh pekerjaan layak

1. **Peningkatan kapasitas dan pengetahuan serikat pekerja dan mitra masyarakat**, agar mereka dapat mendukung layanan mengenai promosi kesetaraan gender, kesadaran hukum, pengorganisasian, advokasi, pendidikan keuangan dan K3 kepada pekerja rumahan, melalui pelatihan untuk pelatih, studi tur ke Self-Employed Women's Association (SEWA) di India, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan berbagi pengetahuan.

2. **Berbagi pengetahuan dan pembentukan jejaring antara para pemimpin pekerja rumahan, staf serikat pekerja serta mitra lembaga masyarakat madani dengan kelompok pekerja rumahan dan perekonomian informal di tingkat regional dan global** melalui:

- Lokakarya Sub-Regional Homenet South-East Asia di Bangkok, Thailand.
- Kegiatan Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), sebuah jaringan global perempuan di sektor perekonomian informal, di Yogyakarta, Indonesia.

3. **Penguatan kapasitas mitra proyek tentang pengelolaan proyek** (laporan teknis dan keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan survei/ pangkalan data).

4. **Pengembangan berbagai materi pelatihan, termasuk materi K3 bagi pekerja rumahan**, kesetaraan gender, advokasi, kesadaran hukum, pengorganisasian, pendidikan keuangan, kepemimpinan, dan manual pelatihan pengasuhan anak berbasis masyarakat.

5. **Memasukkan persoalan pekerjaan rumah dalam forum-forum dialog sosial** yang dihadiri oleh para konstituen tripartit di Jawa Timur dan Sumatera Utara.



Menciptakan basis pengetahuan untuk meningkatkan kondisi kerja pekerja rumahan perempuan dan penyandang disabilitas perempuan yang melakukan pekerjaan rumahan

1. **Pemberian saran teknis dan persiapan untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif:**

- Persiapan rancangan survei dan kuesioner untuk meneliti prevalensi pekerja rumahan untuk dilampirkan pada salah satu survei tenaga kerja bersama dengan Biro Pusat Statistik (BPS).
- Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan IKEA untuk melaksanakan penelitian mengenai kondisi kerja pekerja rumahan dalam rantai nilai rotan IKEA.
- Penelitian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengenai praktik-praktik pengusaha yang melibatkan pekerja rumahan.
- Pelatihan bagi para mitra proyek mengenai studi gender dan pemetaan pekerja rumahan dan pekerja penyandang disabilitas perempuan, dan studi untuk menilai kondisi kerja pekerja rumahan di beberapa provinsi pilihan (Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur).

“Kita harus membuat peraturan daerah untuk melindungi pekerja rumahan”

Totok Nurhandajanto, Kepala Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu dari 22 peserta yang berpartisipasi dalam anjang karya (*study tour*) ke Self-Employed Women's Association (SEWA), sebuah organisasi berbasis keanggotaan, di Ahmedabad, India. Tur tersebut diselenggarakan oleh Proyek MAMPU ILO bekerja sama dengan SEWA dari tanggal 16 hingga 25 September 2014. MAMPU ILO adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan atas ketenagakerjaan dan pekerjaan layak, yang didanai oleh Pemerintah Australia.

Selama studi tur, Totok sangat terkesan dengan prestasi SEWA yang berawal dengan para relawan untuk menjangkau dan mengorganisir pekerja rumahan perempuan selama empat dasawarsa lalu, dan sekarang memiliki hampir dua juta anggota di beberapa provinsi di India.

Totok mengakui kondisi yang sama antara India dan Indonesia berkaitan dengan pekerja rumahan, di mana mereka menghadapi berbagai tantangan termasuk upah rendah, perlindungan K3 yang terbatas, jaminan sosial yang terbatas dan jam kerja yang panjang. SEWA mengorganisir pekerja rumahan, menghubungkan mereka dengan



program perlindungan dan kesejahteraan sosial pemerintah, dan mengadvokasi hak-hak mereka sebagai pekerja kepada pemerintah.

Mengkaji semua tantangan dan prestasi SEWA selama 40 tahun terakhir ini, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memanfaatkan kapasitasnya sebagai

pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah pekerja rumahan, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Pekerja rumahan adalah pekerja yang tidak tentu, rentan dan terpinggirkan. Definisi pekerja rumahan dalam Konvensi ILO No. 177 mencakup tiga unsur umum sebuah hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan Indonesia: pekerjaan yang ditetapkan, pengupahan dan tingkat subordinasi. Namun, pekerja rumahan tidak diakui atau secara eksplisit didefinisikan oleh undang-undang atau peraturan nasional, membuat mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan sosial di Indonesia.

“Sebelum saya terlibat dalam Proyek MAMPU ILO, saya tidak menyadari keberadaan pekerja rumahan. Terlibat dalam Proyek dan berpartisipasi dalam studi tur, saya belajar tentang pekerja rumahan dan kondisi kerja mereka, dan

juga apa yang bisa kita lakukan untuk mengakui mereka sebagai pekerja melalui peraturan,” kata dia.

Selain menjadi Kepala Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Totok juga menjadi Ketua Komite Lembaga Kerja Sama (LKS) mekanisme Tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja) di Provinsi Jawa Timur. Menyadari pentingnya penyusunan peraturan untuk mengakui dan melindungi pekerja rumahan, dia memanfaatkan Lembaga Kerjasama untuk menyelenggarakan diskusi tentang perlunya melindungi pekerja rumahan dengan juga melibatkan LSM lokal terkait yang mendukung pekerja rumahan.

“Tantangan utama dalam menyusun peraturan di tingkat daerah adalah tidak adanya undang-undang nasional yang secara eksplisit mengatur pekerja rumahan.” Di sisi lain, dia menyaksikan kasus-kasus di mana peraturan daerah disusun tanpa adanya undang-undang nasional. “Ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah dan legislatif guna untuk menanggapi kondisi sosial.

Belajar dari India, ia khawatir pekerjaan rumahan menjadi semakin lazim di Indonesia. Jumlah pekerja rumahan mungkin meningkat tetapi mereka tidak terlihat dan tidak terlindungi. Kita berharap Jawa Timur bisa memprakarsai peraturan meskipun tidak akan mudah. Tetapi jika kita mulai dari langkah-langkah kecil, saya yakin kita akan melihat beberapa perubahan,” pungkasnya. ❖

1 Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumahan, 1996, No. 177, mendefinisikan pekerja rumahan sebagai: “seseorang yang mengerjakan pekerjaan di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; untuk mendapatkan upah yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan”.



Program Pengarusutamaan Gender

Sekilas:

Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan di dunia kerja merupakan tanggung jawab seluruh konstituen ILO. Melanjutkan program yang dilaksanakan di berbagai fase berbeda program kemitraan Nowergia/ILO pada periode 2008-2011, Program Pengarusutamaan Gender (GMP) terfokus pada upaya memastikan semua kegiatan di bawah kemitraan Nowergia/ILO terarusutamakan secara gender: Misalnya "kepentingan perempuan dan laki-laki menjadi bagian terpadu setiap kegiatan ILO di Indonesia dari tahap perancangan, penerapan, pemantauan hingga evaluasi agar setiap perempuan dan laki-laki secara setara mampu memperoleh manfaat dan mengakhiri praktik ketidaksetaraan. Tujuan dari proyek GMP di Indonesia ini adalah memastikan tujuan dan hasil dari proyek ini disusun dengan mempertimbangkan aspek gender di Indonesia. Dimulai pada 2012, Proyek ini berakhir pada Maret 2014.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2014:

1. **Pengembangan modul pelatihan bagi para pengawas ketenagakerjaan mengenai “Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesetaraan Gender”,** termasuk penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih bagi pengawas ketenagakerjaan terkait.
2. **Penyusunan Pedoman Kesetaraan Upah untuk perusahaan.**
3. **Penyelenggaraan pelatihan lokakarya di tingkat provinsi bagi para pemimpin pekerja rumah tangga dan pemimpin serikat pekerja,** dengan menggunakan panduan pelatihan baru mengenai pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga yang diadaptasi untuk Indonesia.
4. **Pelaksanaan advokasi atas ratifikasi Konvensi No. 189 mengenai Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga,** dan kerangka kerja peraturan perundangan nasional berdasarkan hak pekerja untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga.
5. **Pelaksanaan pelatihan lokakarya di tingkat provinsi mengenai Kesetaraan Gender di Tempat Kerja** di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Empat kementerian sepakat hentikan diskriminasi di tempat kerja

Tanggal 27 Agustus 2014 menandai langkah penting dalam menghapus diskriminasi di tempat kerja. Empat kementerian—Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)—telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat kemitraan mereka dalam mengurangi diskriminasi di tempat kerja.

Setelah acara penandatanganan Nota Kesepahaman ini yang dihadiri sekitar 500 peserta, termasuk 34 perwakilan daerah, Kementerian Tenaga Kerja meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Kesetaraan Kesempatan Kerja yang akan dibentuk di tingkat provinsi sebagai upaya mendukung kesetaraan di tempat kerja. Saat ini, Satgas Kesetaraan ini hanya ada di tingkat nasional.

Irianto Simbolon, Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja, mengatakan bahwa tujuan utama dari Nota ini adalah membentuk Satgas Kesetaraan di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan. “Tujuan Satgas adalah memastikan semua pekerja menikmati kesetaraan hak atas kondisi kerja yang sama di semua tingkatan.”

Segregasi pekerjaan masih menjadi kendala, di mana perempuan kurang terwakilkan dalam jenis pekerjaan berupah tinggi dan jabatan manajerial senior. Proporsi pekerja di sektor pekerjaan rentan terbilang lebih tinggi di kalangan perempuan, yaitu sebesar 65 persen, dibandingkan 57 persen untuk laki-laki, dengan lebih tingginya presentase perempuan sebagai pekerja keluarga tanpa upah dibandingkan laki-laki yang terbilang tinggi sebagai pekerja mandiri.

Di Indonesia, perempuan juga memperoleh upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan kesenjangan upah terjadi di kalangan pekerja dengan tingkat pendidikan rendah; 35,54 persen untuk mereka yang tidak tamat SD dan 36,42 persen untuk mereka yang tamat SD.

Untuk menjawab masalah diskriminasi gender ini, banyak negara telah menetapkan mekanisme khusus untuk memerangi diskriminasi di pasar kerja serta mempromosikan diversitas dan kesetaraan gender. Dengan peluncuran Satgas Kesetaraan ini, Pemerintah Indonesia telah bergabung dengan sejumlah negara di Asia yang telah mengambil langkah praktis untuk mempromosikan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pekerjaan. ❖

Publikasi



Panduan Peliputan Media mengenai Disabilitas di Indonesia

ISBN: 978-92-2829328-9

Merupakan panduan pertama, Panduan ini disusun untuk menyediakan sumber informasi praktis bagi awak media profesional yang tertarik untuk meliput dan memberitakan persoalan-persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia. Panduan ini merupakan sumber informasi 'satu atap' mengenai statistik disabilitas global, dan menyediakan panduan praktis mengenai terminologi yang tepat, tips pemberitaan, referensi standar nasional dan internasional utama dengan fokus khusus pada hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan.



Rancangan Sistem Rujukan Terpadu untuk Perluasan Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Latar belakang dan dasar hukum, rancangan sistem rujukan terpadu, dan peta jalan penerapannya

ISBN: 978-92-2829083-7

Sistem Rujukan Terpadu (SRT), juga dikenal sebagai Layanan Satu Atap, memastikan koordinasi yang lebih baik di antara semua pemangku kepentingan perlindungan sosial baik di tingkat operasional maupun kebijakan, dan karenanya meningkatkan efisiensi dalam menyalurkan manfaat perlindungan sosial dan layanan ketenagakerjaan. Layanan terpadu untuk program perlindungan sosial dan layanan ketenagakerjaan ini meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai jaminan dan layanan, memfasilitasi proses pendaftaran, memperbarui pangkalan data, dan memfasilitasi mekanisme pengaduan serta meningkatkan koordinasi antara program.



Program ILO di Indonesia: Capaian 2013

ISBN: 978-92-2-028567-1

Publikasi ini menyajikan secara ringkas capaian-capaian kerja ILO di Indonesia selama tahun 2013. Hasil kerja pada 2013 berdasarkan kemitraan dengan para konstituen kami, Pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atas nama pengusaha.



Panduan Praktik yang Baik untuk Mempekerjakan Pekerja Rumahan bagi Pengusaha

ISBN: 978-92-2828040-1

Panduan praktik yang diterbitkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama ILO ini akan meningkatkan pemahaman pengusaha tentang peran dan tanggung jawab mereka kepada pekerja rumahan dan akan meningkatkan kepatuhan terhadap standar minimum.



Tinjauan Kerangka Peraturan Perundang-Undangan untuk Pekerja Rumahan di Indonesia 2013

ISBN: 978-92-2827621-3

Laporan ini berupaya untuk mendukung proses pengembangan peraturan nasional yang khusus mengenai pekerjaan rumahan, dengan meninjau dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam kerangka hukum nasional saat diberlakukan untuk para pekerja rumahan.

Untuk mengunduh versi elektronik dari publikasi-publikasi ini, kunjungi situs ILO Jakarta: www.ilo.org/jakarta

Kegiatan Utama

- Peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja se-Dunia berjudul “Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Kecil Menengah di Indonesia”, Jakarta, 28 April
- Peluncuran Program SCORE Tahap II, Jakarta, 26 Mei
- Lokakarya Serikat Pekerja mengenai Kebijakan Penetapan Upah, Bogor, 16-18 Juni
- Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak bertajuk “Memperluas Perlindungan Sosial untuk Memerangi Pekerja Anak”, Jakarta, 23 Juni
- Pelatihan Media untuk Organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas, Jakarta, 17-18 Juli
- Peluncuran studi terbaru mengenai dampak pasar kerja terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 bertajuk “Masyarakat ASEAN 2015: Mengelola integrasi bagi pekerjaan yang lebih baik dan kesejahteraan bersama”, Jakarta, 20 Agustus
- Lokakarya Ketenagakerjaan Muda berjudul “Kebijakan dan Program Ketenagakerjaan Muda di Indonesia: Langkah ke Depan”, Jakarta, 23 September
- Lokakarya Regional mengenai Penerapan Pengakuan Keterampilan Bersama di ASEAN, Jakarta, 24-25 September
- Simposium Regional mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta, 1-3 Oktober
- Dialog Sektor Swasta mengenai Program HIV di Tempat Kerja dan Inisiatif VCT@Work, Jakarta, 31 Oktober
- Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (C-BED) di Kampus berjudul “Mempercepat Kewirausahaan di Kampus”, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta, 22 November
- Lokakarya mengenai Memerangi Pekerja Anak melalui Pelatihan Keterampilan dan Mata Pencarian bagi Anak-anak yang Lebih Besar, Jakarta, 24-26 November
- Peluncuran studi terbaru berjudul “Rancangan studi sistem rujukan terpadu untuk perluasan program perlindungan sosial di Indonesia”, Jakarta, 2 Desember

- Peluncuran Panduan Peliputan Media mengenai Disabilitas, Jakarta, 3 Desember
- Kunjungan Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder, ke Indonesia, Jakarta dan Kupang, 10-13 Desember
- Lokakarya Regional Serikat Pekerja berjudul "Peningkatan Kapasitas Organisasi Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak", Yogyakarta, 15-17 Desember